



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2109, 2016

KEMENKES. DAK Nonfisik. Penggunaan. Juknis.
TA 2017.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2017.
- (2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
- (3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

- a. bantuan operasional kesehatan (BOK);
- b. jaminan persalinan (Jampersal);
- c. akreditasi puskesmas; dan/atau
- d. akreditasi rumah sakit.

Pasal 3

Bantuan operasional kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a utamanya diarahkan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas;
- b. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pemanfaatan sistem *e-logistik* di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Jaminan persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 5

Akreditasi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas;
- b. pendampingan akreditasi puskesmas; dan
- c. survei akreditasi puskesmas.

Pasal 6

Akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. *workshop* pendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit;
- b. pembinaan rumah sakit dalam rangka persiapan akreditasi; dan
- c. survei akreditasi rumah sakit.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kepala daerah, Kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit provinsi, dan direktur rumah sakit kabupaten/kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan kompilasi laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
- (4) Kompilasi laporan oleh kepala dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 9

Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Tahun 2017 Pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp.23.220.985.381.000,- (dua puluh tiga triliun dua ratus dua

puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.16.603.785.381.000,-, (enam belas triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan DAK Nonfisik sebesar Rp.6.617.200.000.000,- (enam triliun enam ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah). Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2017 untuk kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis dengan prioritas nasional.

Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggungjawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera; 2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan.

Mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan DAK Bidang Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tatakelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.

Petunjuk Teknis merupakan pedoman penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Mendukung terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan promotif dan preventif;
- c. Mendukung terlaksananya akreditasi puskesmas di daerah;
- d. Mendukung terlaksananya akreditasi RS di daerah;
- e. Mendukung terlaksananya pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar.

C. SASARAN

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, beserta UPT-nya;
2. Rumah Sakit Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 dipergunakan untuk:

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2. Jaminan Persalinan (Jampersal)
3. Akreditasi Puskesmas
4. Akreditasi Rumah Sakit

E. KEBIJAKAN OPERASIONAL

DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional yang meliputi:

1. Kebijakan Umum

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- b. DAK Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan melalui operasional puskesmas.
- c. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
- d. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
- f. Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan.
- g. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang KPA kepada kepala puskesmas dalam pelaksanaan BOK di lapangan.
- h. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK Nonfisik.

- i. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kebijakan Khusus
- a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 - 1) Dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik di kabupaten/kota dan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat terwujud pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif untuk menghasilkan luaran yang maksimal maka alokasi dana DAK Nonfisik khususnya BOK (BOK Puskesmas, BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dan Jampersal dapat digunakan untuk dukungan manajemen satuan kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan besaran maksimal 5% dari alokasi yang diterima dengan pemanfaatan disusun oleh daerah dengan mengacu tugas dan fungsi serta pada ketentuan yang berlaku.
 - 2) Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen puskesmas yang baik;
 - 3) Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja puskesmas sehingga terbentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat;
 - 4) Biaya distribusi obat dan BMHP dimanfaatkan untuk menjamin obat dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di puskesmas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Penyediaan alokasi DAK untuk kegiatan ini hanya sebagai pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan tersebut;

b. Jaminan Persalinan (Jampersal)

Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan;

c. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit

Akreditasi puskesmas dan rumah sakit diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.

BAB II
MANAJEMEN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

A. PERENCANAAN

Kepala Daerah yang menerima DAK Tahun 2017 dan Kepala SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.

1. DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2017 dan RKPD 2017.
2. Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
3. Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia.

B. PENGELOLAAN

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Jaminan persalinan disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Akreditasi puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Akreditasi rumah sakit disalurkan melalui rumah sakit.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
- c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

- d. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan *input*, proses, *output*.
- e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2017 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019.

2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan oleh organisasi pelaksana dan atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
- b. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang administrasi. Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAPORAN

1. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan (Bagan 1: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota; Bagan 2: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi). Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Nonfisik (Akreditasi) menggunakan format laporan sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Format laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik bidang kesehatan triwulanan Akreditasi Puskesmas dan rumah sakit menggunakan contoh Formulir terlampir.
- b. Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal mengacu pada capaian indikator program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015–2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.

Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.

- c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan/mem*feedback* hasil pelaksanaan penerapan aplikasi e-logistik/aplikasi logistik obat dan BMHP setiap triwulan melalui bank data pusat (bankdataelog.kemkes.go.id/e-logistics).
- d. Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat kembali perkembangan pelaksanaan DAK di lapangan. Review dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada daerah.

2. Pelaksana Pelaporan

- a. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).
- b. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
- c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Jenis Pelaporan

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri:

- a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan berakhir.
 - b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah yang berlaku.
 - c. Disamping laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015-2019 dan RKP Tahun 2017), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
 - d. Laporan tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan (melalui Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
4. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK kepada:
- a. Menteri Kesehatan
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Menteri Keuangan
5. Alur Pelaporan
- a. Pelaksanaan di Puskesmas
Kepala puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota
 - 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan).
 - 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas

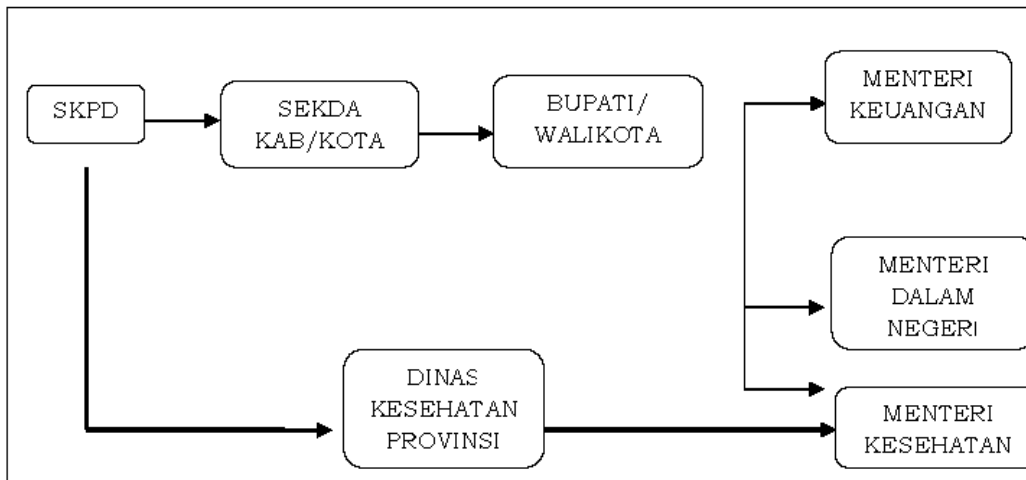
Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di kabupaten/kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Nonfisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Nonfisik Jampersal).

- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Pelaksanaan di Provinsi

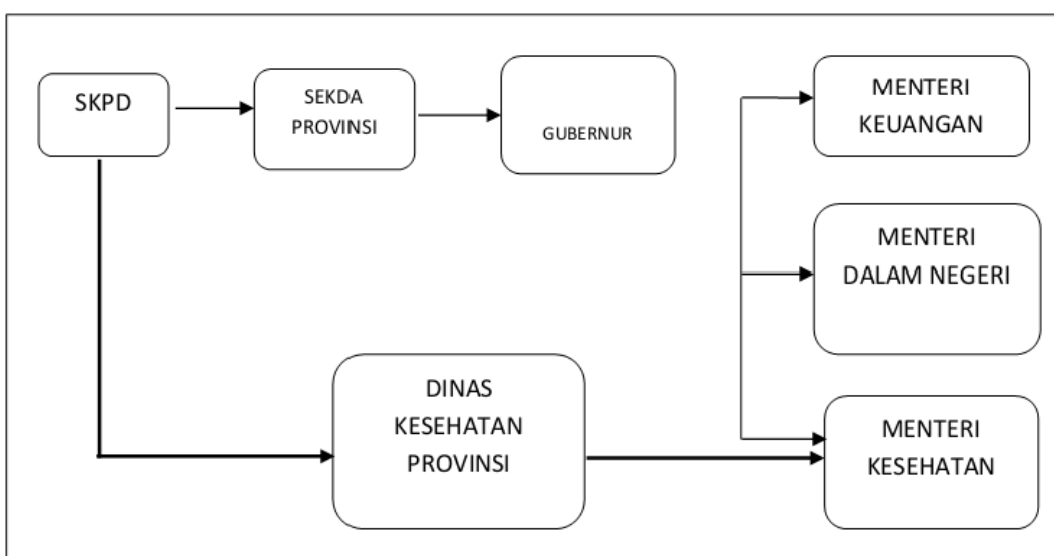
- 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan).
- 4) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Nonfisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Nonfisik Jampersal).
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota



Ket :
→ : laporan langsung
SEB
→ : laporan langsung

Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi



Ket :
→ : laporan langsung SEB
→ : laporan langsung

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

A. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

1. Umum

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam mendukung operasional puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan BMHP di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan sistem informasi logistik secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

BOK tahun 2017 dalam pemanfaatan mengalami perluasan bukan hanya untuk operasional puskesmas dan dukungan manajemen, tetapi juga untuk peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: 1) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPTnya; 2) untuk kegiatan peningkatan distribusi obat ke puskesmas dan pemanfaatan sistem e-logistik di kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan di puskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lain yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dana lainnya yang sah yang dikelola menggunakan mekanisme APBD.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

- 1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;

- 2) Mendukung pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah.
- b. Tujuan Khusus
- 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
 - 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 - 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;
 - 5) Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - 6) Mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin ke puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
3. Sasaran
- a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Balai Kesehatan Masyarakat (UPT Kabupaten/Kota);
 - c. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Kebijakan Operasional
- a. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
 - b. Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat;
 - c. Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan;
 - d. Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;

- e. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;
 - f. Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di puskesmas;
 - g. Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota;
 - h. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOK diatur oleh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Ruang lingkup kegiatan BOK, utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif disetiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi:
- a. BOK untuk puskesmas;
 - b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Kesehatan Masyarakat;
 - c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
6. Pengalokasian BOK
- Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan peruntukan bagi puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis bila ada, dan instalasi farmasi Kabupaten/Kota. Distribusi dana BOK yang dialokasikan setiap kabupaten/kota dengan rincian untuk masing-masing kegiatan terdapat pada lampiran.
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran sesuai yang ditetapkan dalam lampiran.
 - b. Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima alokasi dengan besaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per balai per tahun yang bersumber dari alokasi BOK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- c. Setiap puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat pertahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas. Daftar puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat sebagaimana terlampir.
- d. Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas.
- e. Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk puskesmas disetiap kabupaten/kota setelah dikurangi untuk kebutuhan Nusantara Sehat dan Desa STBM diatas didistribusikan kepada semua puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.
- f. Khusus puskesmas yang ada Program Nusantara Sehat dan atau desa STBM maka besaran alokasi BOK menjadi penjumlahan dari point (c + d + e) tersebut di atas dan tergantung ada atau tidaknya point c dan d di atas.
- g. BOK distribusi obat dan e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk pemanfaatan sistem e-logistik.

7. Penggunaan Dana BOK

Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi:

a. Kegiatan Puskesmas

Dana BOK puskesmas dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi:

- 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan

rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga.

2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana tim tersebut berada.

3) Kegiatan STBM

Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan *update* peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye *higiene* sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagaimana terlampir.

4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Balai Kesehatan Masyarakat

Penggunaan BOK untuk Balai Kesehatan Masyarakat yang merupakan UPT kabupaten/kota untuk meningkatkan jangkauan pelayanan promotif dan preventif di luar gedung Balai Kesehatan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat termasuk menjalankan fungsi rujukan UKM dari dan ke puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan agar bersinergi dengan puskesmas setempat untuk mendukung *outreach* puskesmas melalui pendekatan keluarga. Petunjuk teknis kegiatan ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Balai Kesehatan Masyarakat.

c. Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dana BOK di kabupaten/kota digunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukungan manajemen sebagai

pengelola keuangan satuan kerja pengelola BOK, serta Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat kabupaten/kota, pembinaan program kesehatan masyarakat ke puskesmas minimal 4 kali/tahun, menghadiri mini lokakarya di puskesmas, melaksanakan kampanye, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, fungsi rujukan UKM dari puskesmas maupun ke puskesmas berupa fasilitasi, *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dll). Teknis pelaksanaan kegiatan UKM sekunder ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di 359 kabupaten (terlampir) berupa pengangkatan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian desa STBM di puskesmas termasuk dukungan operasionalnya.
- 3) Dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat kabupaten/kota.
- 4) Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas meliputi:
 - a) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas, dapat digunakan untuk:
 - (1) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - (2) Bagi kabupaten pemekaran, dapat digunakan untuk biaya perjalanan dinas/transport petugas Instalasi Farmasi Kabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi Kabupaten induk;
 - (3) Biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan BMHP;
 - (4) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan
 - (5) Honorarium tenaga bongkar muat.
 - b) Pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk:
 - (1) Pertemuan koordinasi e-logistik di kabupaten/kota dengan mengundang petugas puskesmas. Tata cara

penyelenggaraannya mengacu pada pedoman teknis terkait dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes serta ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;

- (2) Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi e-logistik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Biaya langganan internet;
- (4) Honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik (dinas kesehatan). Tenaga pengelola ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Besaran honor mengacu pada peraturan yang berlaku.

8. Pemanfaatan Dana BOK

Dana BOK yang tersedia disetiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:

- a. Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
- b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
- c. Pembelian barang pakai habis;
- d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
- e. Belanja cetak dan penggandaan;
- f. Belanja makanan dan minuman;
- g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
- h. Honorarium PNS dan non PNS;

Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan.

Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak untuk kegiatan tersebut dengan ketentuan:

- a. Pembayaran honor 1 (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan di setiap puskesmas. Tenaga tersebut dikontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Biaya honor berasal dari dana BOK untuk Puskesmas. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promotor kesehatan adalah:
 - 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/peminatan Kesehatan Masyarakat utamanya jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/IlmU Perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.
 - 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten/kota yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (*output based performance*).
 - 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya
 - 4) Diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja.
 - 5) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kerjanya
- b. Dana BOK fasilitas UKM sekunder di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk membayar tenaga STBM kabupaten dengan ketentuan 1 (satu) orang tenaga STBM kabupaten yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak STBM adalah:
 - 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan.
 - 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kabupaten (*output based performance*).
 - 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf kabupaten lainnya
 - 4) Diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja.

- 5) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya

9. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
1	Upaya Kesehatan Ibu	1 Pelayanan antenatal/ ANC	1 Pendataan sasaran (TERPADU)
			2 Pelayanan antenatal
			3 Pemberian PMT bumil
			4 Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
			5 Pemantauan bumi risiko tinggi
			6 Pelaksanaan kelas ibu
			7 Kemitraan bidan dukun
			8 Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau <i>drop out</i>
			9 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal
			10 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu
			11 Pembinaan UKBM
		2 Pelayanan ibu nifas	1 Pelayanan nifas termasuk KB
			2 Pemantauan kesehatan ibu nifas
2	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	1 Pelayanan kesehatan neonatus	1 Pemeriksaan neonatus
			2 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
			3 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal
			4 Kunjungan rumah tindak lanjut <i>Screening Hipothyroid Kongenital</i> (SHK)
		2 Pelayanan kesehatan bayi	1 Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
			2 Kunjungan rumah/pendampingan
			3 Pemantauan bayi risiko tinggi
3	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah	Pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah	1 Pemantauan kesehatan balita termasuk balita risiko tinggi
			2 Pelacakan kematian balita termasuk otopsi verbal
			3 Pemantauan kesehatan balita
			4 Surveilans dan pelacakan gizi buruk
			5 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan
			6 Pembinaan Posyandu
4	Upaya Kesehatan Anak Usia	Pelayanan kesehatan anak	1 Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
	Sekolah dan Remaja	usia sekolah, institusi dan non institusi	2 Penjaringan peserta didik (kelas 1, 7, 10)
			3 Pemeriksaan berkala peserta didik
			4 Pemberian TTD untuk remaja putri
			5 Bulan imunisasi anak sekolah
			6 Pembinaan kesehatan di panti/LKSA/karang taruna/remaja di tempat ibadah
			7 Penemuan kasus
5	Imunisasi	1 Imunisasi dasar, imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru	1 Pendataan sasaran (TERPADU) a. Validasi data hasil cakupan imunisasi b. Surveilans KIP (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi)
			2 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi: a. Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi b. Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
			3 KIE Media KIE sederhana; pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			4 Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			5 Pelayanan imunisasi termasuk <i>sweeping</i> imunisasi dan DOFU (<i>Drop Out Follow Up</i>)
			6 Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan <i>safety box</i>)
		2 Imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT	1 Pendataan sasaran a. Surveilans KIP (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) b. Validasi data hasil cakupan imunisasi
			2 Peningkatan kapasitas kader imunisasi
			3 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
			4 KIE Media KIE sederhana; pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			5 Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
			6 Pelayanan imunisasi
			7 Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan <i>safety box</i>)
		3 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), <i>crash program</i> , <i>backlog fighting</i> , dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (<i>Outbreak Respon Immunization /ORI</i>)	1 Pendataan sasaran a. Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) b. Validasi data hasil cakupan imunisasi
			2 Peningkatan kapasitas kader
			3 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
			4 KIE Media KIE sederhana; pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			5 Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			6 Pelayanan imunisasi
			7 Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan <i>safety box</i> , tinta)
6	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	1 Penyuluhan, orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana
			2 Pembinaan
			3 Pendampingan kasus korban KtP/A
			4 Pemeriksaan IVA
7	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	Pelayanan kesehatan lanjut usia	1 Pendataan pra lansia dan lansia
			2 Pembinaan dan Pelayanan lanjut usia di UKBM (Posbindu dan Posyandu Lansia)
			3 Pemantauan lansia resiko tinggi
8	Upaya Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum
			2 Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel
			3 Orientasi <i>natural leader</i> , STBM, penjamah makanan dan kader kesling lainnya

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
			4 Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM, implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya
			5 Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat
9	Upaya Promosi Kesehatan	Pelayanan promosi kesehatan	1 Penyegaran/ <i>refreshing</i> , orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 2 Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan 3 Survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa 4 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan 5 Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan 6 Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat 7 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha
10	Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)	1 Pencegahan dan pengendalian penyakit 2 Penemuan dan pencegahan dini secara aktif 3 SKD KLB	1 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 1 Penemuan kasus secara dini 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal) 4 Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i> tata laksana 5 Pengambilan dan pengiriman spesimen 6 Pendampingan 7 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 1 Verifikasi dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		
			3	Pengambilan dan pengiriman spesimen	
			4	Mapping masalah	
11	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara	1 Pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	
			2	Orientasi kepada kader kesehatan	
	lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese encephalopathy, Filariasis, Schistosomiasis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu burung, Leptospirosis, Pes, Taeniasis, F.Buski, penyakit zoonosa lainnya, dll)	2 Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	1	Penemuan kasus secara dini/penyelidikan epidemiologi (termasuk <i>Mass Blood Survey (MBS)/ Mass Fever Survey (MFS)</i>)	
			2	Pelacakan kasus kontak	
			3	Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA	
			4	Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i> tata laksana	
			5	Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah)	
			6	Pendampingan	
			7	Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko	
			8	Pendataan sasaran	
		3	SKD KLB	1	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis
				2	Verifikasi rumor dugaan KLB
				3	Penggulungan KLB
				4	Pengambilan dan pengiriman spesimen
				5	mapping masalah
4	Pencegahan faktor risiko penularan penyakit	Distribusi kelambu			
12	Pengendalian Vektor	1 Pemetaan dan deteksi vektor	1	pemberian obat pencegahan (individu atau masal), termasuk BELKAGA	
			2	Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i> tata laksana	
			3	Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah)	
		2	Intervensi pengendalian vektor terpadu	1	Pendampingan
				2	<i>Sweeping</i> dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
				3	Pendataan sasaran

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
			4 Penganganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan masal filariasis
			5 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat
			6 pembentukan dan pelatihan kader
			7 Pemantauan dan pengendalian vektor
13	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Pencegahan dan pengendalian	1 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
			2 Penguatan forum komunikasi masyarakat desa/kelurahan
			3 Orientasi kepada kader kesehatan
		2 Deteksi dini dan tindak lanjut dini	1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
			2 Kunjungan rumah
			3 Pendampingan
			4 Surveilans penyakit tidak menular di masyarakat
3 Upaya berhenti merokok	Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah		
14	Surveilans dan Respon KLB	1 Surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB	1 Surveilans rutin PD3I tertentu (campak, difteri, pertusis, TN)
			2 Pengambilan dan pengiriman spesimen
			3 Verifikasi rumor masalah kesehatan
			4 Pencatatan dan pelaporan serta analisis data
			5 Surveilans berbasis kejadian (penyakit infeksi <i>emerging</i> , dll)
		2 Penyelidikan epidemiologi KLB	1 Pertemuan koordinasi
			2 Pelaksanaan penyelidikan
			3 Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi
			4 Diseminasi informasi
		3 Pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana	1 Surveilans kontak
			2 Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana
			3 Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana
		15	Upaya Kesehatan Jiwa

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
		dan napza	psikotik, penyalahgunaan napza (alkohol dan zat psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, masalah keswa lainnya
			2 Sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan napza (alkohol dan zat psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri
		2 Pengendalian masalah keswa dan napza	1 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan napza (alkohol dan zat psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya 2 Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain: a. <i>Sweeping</i> /pencarian kasus b. Penemuan kasus secara dini, konseling, pemberian obat dan pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah
16	Upaya Kesehatan Lainnya	1 Pelayanan kesehatan kerja	1 Pendataan sasaran (TERPADU) 2 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 3 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 4 Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja
		2 Pelayanan kesehatan tradisional	1 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 2 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer
		3 Pelayanan kesehatan olahraga	1 Pemeriksaan kebugaran 2 Pembinaan kesehatan olahraga 3 Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga
		4 Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik	

*Pendataan Terpadu menggunakan Instrumen pendekatan Keluarga

10. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk Dukungan Manajemen (perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan penilaian) di Puskesmas

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Manajemen Puskesmas	1 Penyusunan perencanaan puskesmas/ penyusunan POA
		2 Lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan
		3 Evaluasi/Penilaian kinerja
		4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai	1 Pembelian ATK
		2 Fotocopy/penggandaan form keluarga sehat
3	Konsultasi, Pembinaan Teknis	1 Konsultasi ke kabupaten/kota
		2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, institusi
4	Sistem Informasi	1 Penggandaan laporan
		2 Pengiriman laporan

11. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen di Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan
1.	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di kabupaten/kota dan Puskesmas	1 Honor satker termasuk pengelola keuangan Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku
		2 Dukungan administrasi antara lain ATK, penggandaan
2	Pembinaan Administrasi	1 Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
		2 Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas
		3 Konsultasi

12. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas

a. Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari IFK ke Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Distribusi dengan menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	<p>Belanja perjalanan dinas: Uang harian</p> <p>Belanja bahan: - Bahan bakar - Peralatan pengepakan: dus, selotip, plastik, dll</p> <p>Honor output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat</p>
2	Distribusi tidak menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	<p>Belanja perjalanan dinas: - Uang harian - Biaya transport*</p> <p>Belanja Sewa Sewa alat transportasi*</p> <p>Belanja bahan: Peralatan pengepakan: dus, selotip, plastik, dll</p> <p>Honor Output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat</p>

3	Jasa pengiriman pihak ketiga	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja bahan: Peralatan pengepakan : dus, selotip, plastik,dll Belanja jasa lainnya: Jasa pengiriman obat, vaksin dan BMHP Honor output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat
---	------------------------------	-----------------------	--	--

*) pilih salah satu, sesuai peraturan yang berlaku

b. Pemanfaatan Sistem E-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Pertemuan koordinasi e-logistik di kab/kota	Kab/Kota	Dilaksanakan 3 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: Honor Narsum Belanja perjadiin biasa: - Transport - Uang Harian
2	Perjalanan dinas bagi petugas kesehatan kab/kota untuk melakukan koordinasi e-logistik ke provinsi	Provinsi	Dilaksanakan 1 hari (diluar perjalanan), 1 orang	Belanja perjadiin biasa: - Transport - Uang harian - Penginapan (tentatif)
3	Biaya langganan internet	IFK	Biaya internet selama satu tahun	Belanja langganan daya dan jasa Langganan internet
4.	Honorarium untuk pengelola aplikasi e- logistik (dinas kesehatan)	IFK	Honor pengelola per bulan selama satu tahun	Honor output kegiatan

B. JAMINAN PERSALINAN

1. Umum

Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit) maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

3. Sasaran

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- b. Rumah Sakit;
- c. Puskesmas.

4. Kebijakan Operasional

- a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- b. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- d. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- e. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- f. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- g. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas;
- h. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- i. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten/kota meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir;

6. Pengalokasian Dana Jampersal

Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal per kabupaten/kota merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

7. Penggunaan Dana Jampersal

Dana jampersal di kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.

- b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten/kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Setiap kabupaten/kota diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

8. Pemanfaatan Dana Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

9. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

10. Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang standar biaya Jampersal meliputi:

- a. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis, aksesibilitas,
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Belanja jasa pengiriman spesimen.

C. AKREDITASI PUSKESMAS

1. *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala Puskesmas dan para staf Puskesmas terhadap 1) Audit Internal dan Tinjauan Manajemen, dan 2) Keselamatan Pasien. Kegiatan ini dilaksanakan masing-masing oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi puskesmas dengan melibatkan narasumber yang kompeten di bidang mutu dan akreditasi FKTP (pelatih pendamping akreditasi FKTP, surveyor akreditasi FKTP, dan pendamping akreditasi FKTP), organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Pola pembiayaan mengikuti standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Kegiatan *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri dari:

- a. *Workshop* Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
- b. *Workshop* Keselamatan Pasien

Komponen kegiatan *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas yaitu:

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1.	<i>Workshop</i> Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	Dinas Kesehatan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) 	Belanja bahan: - ATK & penggandaan - Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @ 2 jam) - Honor Fasilitator (4 orang @ 2 jam) - Honor Moderator (1 orang @ KL) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket <i>meeting</i> dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket <i>meeting fullday</i>
2.	<i>Workshop</i> Keselamatan	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian materi 	Belanja bahan: - ATK & Penggandaan

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
	Pasien	Kab/Kota	dilaksanakan selama 2 hari efektif - Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)	- Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @ 2 jam) - Honor Fasilitator (4 orang @ 2 jam) - Honor Moderator (1 orang @ KL) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket <i>meeting</i> dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket <i>meeting fullday</i>

2. Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Pendampingan akreditasi puskesmas dilaksanakan oleh tim pendamping terlatih akreditasi puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari jajaran fungsional atau struktural Dinas Kesehatan dan/atau pihak ketiga yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Komponen belanja Pendampingan Akreditasi Puskesmas mengikuti Standar Biaya Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.

Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri dari:

- a. *Workshop* Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
- b. *Workshop* Keselamatan Pasien

Komponen kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas yaitu:

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1.	<i>Workshop</i> Penggalangan Komitmen	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim	Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		pendamping		(1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
2.	<i>Workshop</i> Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
3.	Pendampingan <i>Self Assessment</i> dan Penyusunan PoA Akreditasi di Puskesmas	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
4.	Pendampingan Penyusunan Dokumen	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
5.	Pendampingan Implementasi Dokumen	Puskesmas yang diusulkan	Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan,	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	jumlah peserta menyesuaikan	Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
6.	Penilaian Pra Akreditasi	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
7.	Pendampingan Pasca Akreditasi	Puskesmas yang telah tersertifikasi akreditasi dan dilaksanakan oleh Tim Pendamping	Dilaksanakan minimal 2x per tahun dan maksimal 4x per tahun setiap Puskesmas @ 2 hari	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat Belanjajasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)

Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 sd 8 bulan, bagi kabupaten/kota yang mengusulkan menu pendampingan akreditasi puskesmas harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.

3. Survei Akreditasi Puskesmas

Survei akreditasi puskesmas merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian tersebut dilakukan

oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP. Komponen belanja survei Akreditasi Puskesmas mengikuti Standar Biaya Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.

Komponen survei akreditasi puskesmas yang dibiayai melalui DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2017, yaitu:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Survei Akreditasi Puskesmas	Puskesmas yang diusulkan akreditasi	Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi), apabila lokasi di daerah T/ST jumlah hari dapat lebih panjang, dengan jumlah hari Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 hari survey dan 2 hari kedatangan dan kepulangan. Apabila lokasi di daerah Terpencil/Sangat Terpencil jumlah hari kedatangan dan kepulangan dapat lebih panjang. Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh surveior (kedatangan kepulangan dan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan	Belanja Bahan: - ATK dan penggantian - Konsumsi Belanja jasa profesi: - Honor surveyor selama 3 hari survey per orang per hari minimal 4 jam Belanja perjadin dalam kota: Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanandinas biasa: - Uang harian surveior selama 3 hari survei ditambah dengan hari kedatangan dan hari kepulangan - Transport surveior dimana dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi <i>real cost</i> (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan SBU daerah) - Penginapan surveior

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			- Uang harian - Honor	

a. Persyaratan Umum

Kabupaten/kota yang berhak mendapatkan dana DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan akreditasi puskesmas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan kegiatan DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan alokasi DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- 3) Adanya *Roadmap* pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 – 2019.
- 4) Puskesmas yang diusulkan untuk di survei diutamakan puskesmas yang telah mendapatkan pendampingan pra akreditasi pada tahun sebelumnya.
- 5) Alokasi anggaran diperuntukan bagi puskesmas yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan *roadmap* dengan besaran *unit cost* pendampingan dan survei akreditasi disesuaikan standar biaya daerah setempat.

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota untuk mendapatkan alokasi DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas, sebagai berikut:

- 1) Menu *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
 - a) Peserta:
 - (1) Kepala Puskesmas
 - (2) Kepala TU
 - (3) Penanggung Jawab Pokja Administrasi dan Manajemen
 - (4) Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM):

- (a) Penanggung Jawab UKM Essensial
 - (b) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
 - (c) Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ditambah:
 - Dokter umum / Dokter Gigi
 - Penanggung Jawab UGD
 - Penanggung Jawab Rawat Inap
 - Penanggung Jawab KIA/Poned
 - Petugas Laboratorium
 - Petugas Kefarmasian
- (5) Ketua Tim Mutu
- b) Peserta bersedia membagikan ilmu yang didapat selama *workshop* kepada karyawan puskesmas lainnya.
- 2) Menu Pendampingan Akreditasi Puskesmas
- a) Adanya *Plan of Action (POA)*/pola perencanaan pendampingan bagi Puskesmas yang disiapkan untuk diakreditasi.
 - b) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
 - c) Adanya pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota selama minimal 3 tahun.
 - d) Diutamakan pada puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi sesuai *roadmap*ke pemerintah pusat.
 - e) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Tenaga Pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP
 - f) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
- 3) Menu Survei Akreditasi Puskesmas
- a) Adanya surat pernyataan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survey pada tahun 2017.

- b) Adanya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas berdasarkan *roadmap* akreditasi.

D. AKREDITASI RUMAH SAKIT

1. Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit meliputi:

a. Persiapan Akreditasi, meliputi:

- 1) *Workshop*
- 2) Pendampingan

b. Survei Akreditasi, meliputi:

- 1) Survei simulasi
- 2) Survei akreditasi

c. Pasca Akreditasi (Survei Verifikasi)

a. Persiapan akreditasi dalam bentuk workshop dilaksanakan untuk menunjang standar akreditasi rumah sakit dalam bentuk:

- 1) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap pengendalian dan pencegahan infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

- 2) *Workshop* Peningkatan Kemampuan Dalam Melakukan Bantuan Hidup Dasar Sebagai Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.

Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan bantuan hidup dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat dirumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

3) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait keselamatan pasien di rumah sakit yang termasuk didalamnya pelaporan insiden, manajemen resiko dan upaya peningkatan mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

4) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait bab manajemen dan penggunaan obat pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

5) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengenai MFK dan K3 rumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	<i>Workshop</i> Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadiin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi 	Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsirapat Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transportnarasu mber - Penginapan narasumber
2	<i>Workshop</i> Persiapan Akreditasi Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD)	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadiin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi 	Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsirapat Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transportnarasu mber - Penginapan narasumber
3	<i>Workshop</i> Persiapan Akreditasi Terkait Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadiin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari 	Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsirapat Belanja jasa profesi:Honor narasumber (4 orang @ 5 jam) Belanja perjadiin biasa: - Transportnarasu mber

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi	- Penginapan narasumber
4	Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO)	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	- Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadi selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi	Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsirapat Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam) Belanja perjadi biasa: - Transportnrasumber - Penginapan narasumber
5	Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Manajemen Fasilitas Keselamatan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	- Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadi selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi	Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsirapat Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam) Belanja perjadi biasa: - Transportnrasumber - Penginapan narasumber

2) Pendampingan Akreditasi

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi penyiapan

dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam pendampingan ini, RS akan dibantu sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS Nasional. Pelaksanaan.

Materi pendampingan persiapan akreditasi rumah sakit berupa:

- a) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi
- b) Standar akreditasi rumah sakit
- c) Penyusunan regulasi rumah sakit
- d) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan
- e) Metode telusur

Pendampingan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pendamping terlatih yang difasilitasi Kementerian Kesehatan atau dapat melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk bimbingan teknis. Tim pendamping terlatih adalah tim dari rumah sakit pemerintah yang telah lulus akreditasi paripurna.

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Pendampingan persiapan Akreditasi	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dilaksanakan 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi dan 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 4 orang Narasumber 	<p>Belanja bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK dan fotocopi - Konsumsi rapat (d disesuaikan jumlah peserta dan NS) <p>Belanja jasa profesi: Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-)</p> <p>Belanja perjadin biasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber <p>Honor Narasumber pada survei akreditasi rumah sakit disesuaikan dengan aturan standar biaya yang berlaku</p>

b. Survei Akreditasi

Survei akreditasi dapat dilakukan dalam bentuk survey simulasi dan survey akreditasi, antara lain:

1) Survei Simulasi Akreditasi

Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.

Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang berwenang.

2) Survei Akreditasi Rumah Sakit

Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS.

Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Survei Simulasi Akreditasi	RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi	Disesuaikan dengan agenda survey simulasi akreditasi dari lembaga akreditasi independen yang berwenang	Honor narasumber pada survei simulasi akreditasi disesuaikan dengan aturan standar biaya yang berlaku
2	Survei Akreditasi Rumah Sakit	RSUD yang siap melaksanakan akreditasi	Disesuaikan dengan agenda survey akreditasi rumah sakit dari lembaga akreditasi independen yang berwenang	Honor narasumber pada survei akreditasi rumah sakit disesuaikan dengan aturan standar biaya yang berlaku

2. Persyaratan Umum

- a. Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
- b. Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
- c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Persyaratan Khusus

- a. Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
- b. Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
- c. Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- d. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.

BAB IV

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				SUB TOTAL	JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	BOK			AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Provinsi Aceh						-	-	-	-
Kab. Simeulue	216,610,000	718,947,000	4,904,322,000	5,839,879,000	1,295,047,000	-	923,930,000	8,058,856,000	
Kab. Aceh Singkil	128,907,000	783,499,000	5,095,734,000	6,008,140,000	1,730,064,000	475,000,000	-	8,213,204,000	
Kab. Aceh Selatan	158,293,000	859,787,000	9,687,418,000	10,705,498,000	1,905,564,000	-	-	12,611,062,000	
Kab. Aceh Tenggara	222,904,000	801,104,000	7,920,054,000	8,944,062,000	2,525,564,000	-	1,225,640,000	12,695,266,000	
Kab. Aceh Timur	259,851,000	894,997,000	12,685,075,000	13,839,923,000	4,443,889,000	-	2,448,850,000	20,732,662,000	
Kab. Aceh Tengah	204,430,000	754,157,000	6,193,259,000	7,151,846,000	2,157,814,000	-	1,225,640,000	10,535,300,000	
Kab. Aceh Barat	199,812,000	742,421,000	5,669,010,000	6,611,243,000	1,946,239,000	-	777,460,000	9,334,942,000	
Kab. Aceh Besar	295,123,000			15,227,871,000					

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		918,471,000	14,014,277,000		-	-	-	-
Kab. Pidie	172,149,000	894,997,000	13,324,265,000	14,391,411,000	3,862,639,000	-	1,438,450,000	19,692,500,000
Kab. Bireuen	135,201,000	801,104,000	8,766,202,000	9,702,507,000	1,796,864,000	-	-	11,499,371,000
Kab. Aceh Utara	195,241,000	953,681,000	15,893,212,000	17,042,134,000	5,451,522,000	-	2,332,380,000	24,826,036,000
Kab. Aceh Barat Daya	112,109,000	742,421,000	5,402,458,000	6,256,988,000	1,131,722,000	-	893,930,000	8,282,640,000
Kab. Gayo Lues	107,491,000	730,684,000	4,820,109,000	5,658,284,000	1,285,747,000	-	-	6,944,031,000
Kab. Aceh Tamiang	204,430,000	754,157,000	6,357,032,000	7,315,619,000	2,778,589,000	475,000,000	893,930,000	11,463,138,000
Kab. Nagan Raya	204,430,000	754,157,000	5,955,867,000	6,914,454,000	1,416,139,000	-	1,225,640,000	9,556,233,000
Kab. Aceh Jaya	98,254,000	707,211,000	4,249,321,000	5,054,786,000	1,297,372,000	-	777,460,000	7,129,618,000
Kab. Bener Meriah	199,812,000	742,421,000	5,359,099,000	6,301,332,000	1,330,114,000	-	640,990,000	8,272,436,000
Kab. Pidie Jaya	190,575,000	718,947,000	4,826,586,000	5,736,108,000	1,215,997,000	-	640,990,000	7,593,095,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Banda Aceh	216,610,000	591,321,000	4,004,249,000	4,812,180,000	787,372,000	-	640,990,000	6,240,542,000
Kota Sabang	167,483,000	561,979,000	2,289,900,000	3,019,362,000	499,072,000	-	523,350,000	4,041,784,000
Kota Langsa	162,865,000	556,111,000	1,814,811,000	2,533,787,000	978,022,000	-	640,990,000	4,152,799,000
Kota Lhokseumawe	167,483,000	561,979,000	2,155,512,000	2,884,974,000	743,197,000	-	481,350,000	4,109,521,000
Kota Subulussalam	75,162,000	556,111,000	1,733,702,000	2,364,975,000	724,597,000	-	481,350,000	3,570,922,000
Provinsi Sumatera Utara					-	-	-	-
Kab. Nias	104,763,000	690,894,000	5,305,944,000	6,101,601,000	1,989,939,000	-	-	8,091,540,000
Kab. Mandailing Natal	159,131,000	894,997,000	10,849,474,000	11,903,602,000	5,050,939,000	-	-	16,954,541,000
Kab. Tapanuli Selatan	200,650,000	777,631,000	7,065,132,000	8,043,413,000	3,172,564,000	450,000,000	-	11,665,977,000
Kab. Tapanuli Tengah	145,276,000	859,787,000	9,634,578,000	10,639,641,000	4,346,064,000	-	-	14,985,705,000
Kab. Tapanuli Utara	214,505,000	812,841,000	8,178,561,000	9,205,907,000	3,465,314,000	-	-	12,671,221,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Toba Samosir	126,802,000	812,841,000	8,526,286,000	9,465,929,000	2,168,564,000	-	-	11,634,493,000
Kab. Labuhanbatu	99,092,000	742,421,000	5,999,259,000	6,840,772,000	5,057,297,000	-	1,300,380,000	13,198,449,000
Kab. Asahan	140,657,000	848,051,000	10,896,507,000	11,885,215,000	7,028,797,000	-	1,300,380,000	20,214,392,000
Kab. Simalungun	196,078,000	988,891,000	15,435,204,000	16,620,173,000	7,970,047,000	450,000,000	-	25,040,220,000
Kab. Dairi	122,184,000	801,104,000	7,626,815,000	8,550,103,000	3,276,314,000	-	880,990,000	12,707,407,000
Kab. Karo	126,802,000	812,841,000	8,706,750,000	9,646,393,000	4,205,564,000	-	-	13,851,957,000
Kab. Deli Serdang	196,078,000	988,891,000	18,235,364,000	19,420,333,000	17,838,547,000	-	1,761,980,000	39,020,860,000
Kab. Langkat	177,605,000	866,944,000	13,699,280,000	14,743,829,000	9,522,672,000	-	1,415,780,000	25,682,281,000
Kab. Nias Selatan	224,841,000	1,139,235,000	18,459,950,000	19,824,026,000	4,087,689,000	450,000,000	-	24,361,715,000
Kab. Humbang Hasundutan	182,176,000	730,684,000	5,033,464,000	5,946,324,000	2,383,689,000	-	765,590,000	9,095,603,000
Kab. Pakpak Bharat	76,000,000	695,663,000	3,179,271,000	3,950,934,000	934,047,000	-	491,620,000	5,376,601,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Samosir	94,473,000	730,684,000	5,142,480,000	5,967,637,000	1,520,064,000	-	627,020,000	8,114,721,000
Kab. Serdang Bedagai	131,421,000	824,577,000	9,937,329,000	10,893,327,000	5,255,622,000	-	955,990,000	17,104,939,000
Kab. Batu Bara	99,092,000	742,421,000	5,887,697,000	6,729,210,000	3,776,314,000	-	765,590,000	11,271,114,000
Kab. Padang Lawas Utara	205,268,000	789,367,000	7,189,719,000	8,184,354,000	3,651,689,000	-	765,590,000	12,601,633,000
Kab. Padang Lawas	103,710,000	754,157,000	6,163,285,000	7,021,152,000	3,658,189,000	-	938,770,000	11,618,111,000
Kab. Labuhanbatu Selatan	117,565,000	789,367,000	7,295,084,000	8,202,016,000	3,990,314,000	-	938,770,000	13,131,100,000
Kab. Labuhanbatu Utara	117,565,000	789,367,000	7,888,100,000	8,795,032,000	3,189,689,000	-	1,234,040,000	13,218,761,000
Kab. Nias Utara	109,381,000	708,499,000	5,001,218,000	5,819,098,000	1,837,689,000	450,000,000	627,020,000	8,733,807,000
Kab. Nias Barat	95,526,000	730,684,000	3,582,396,000	4,408,606,000	1,237,814,000	450,000,000	-	6,096,420,000
Kota Sibolga	62,144,000	556,111,000	1,775,182,000	2,393,437,000	675,772,000	-	-	3,069,209,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Tanjung Balai	76,000,000	573,716,000	2,864,228,000	3,513,944,000	1,008,247,000	-	-	4,522,191,000
Kota Pematang Siantar	214,505,000	626,342,000	6,995,932,000	7,836,779,000	929,197,000	-	880,990,000	9,646,966,000
Kota Tebing Tinggi	168,321,000	579,584,000	3,208,313,000	3,956,218,000	743,197,000	-	-	4,699,415,000
Kota Medan	219,170,000	743,709,000	14,589,396,000	15,552,275,000	4,094,289,000	-	1,695,640,000	21,342,204,000
Kota Binjai	76,000,000	573,716,000	2,917,154,000	3,566,870,000	1,224,472,000	-	491,620,000	5,282,962,000
Kota Padang Sidempuan	168,321,000	579,584,000	3,162,336,000	3,910,241,000	1,112,872,000	-	491,620,000	5,514,733,000
Kota Gunungsitoli	66,763,000	561,979,000	2,144,594,000	2,773,336,000	915,247,000	-	491,620,000	4,180,203,000
Provinsi Sumatera Barat					-	-	-	-
Kab. Kep. Mentawai	192,466,000	765,894,000	4,911,917,000	5,870,277,000	1,200,489,000	450,000,000	676,035,000	8,196,801,000
Kab. Pesisir Selatan	209,887,000	801,104,000	7,530,826,000	8,541,817,000	2,247,914,000	-	1,249,344,000	12,039,075,000
Kab. Solok	209,887,000	801,104,000	7,999,723,000	9,010,714,000	3,396,464,000	-	845,120,000	13,252,298,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Sijunjung	94,473,000	730,684,000	5,076,571,000	5,901,728,000	1,048,597,000	-	734,896,000	7,685,221,000
Kab. Tanah Datar	232,979,000	859,787,000	10,414,285,000	11,507,051,000	2,858,814,000	425,000,000	734,896,000	15,525,761,000
Kab. Padang Pariaman	242,215,000	883,261,000	11,553,633,000	12,679,109,000	2,869,864,000	-	845,120,000	16,394,093,000
Kab. Agam	228,360,000	848,051,000	10,025,938,000	11,102,349,000	4,109,664,000	-	1,469,792,000	16,681,805,000
Kab. Limapuluh Kota	228,360,000	848,051,000	9,734,589,000	10,811,000,000	3,379,614,000	-	1,183,004,000	15,373,618,000
Kab. Pasaman	200,650,000	777,631,000	6,771,704,000	7,749,985,000	2,829,739,000	-	734,896,000	11,314,620,000
Kab. Solok Selatan	163,702,000	730,684,000	3,768,763,000	4,663,149,000	1,696,289,000	425,000,000	601,502,000	7,385,940,000
Kab. Dharmas Raya	186,795,000	742,421,000	5,689,870,000	6,619,086,000	2,418,214,000	-	734,896,000	9,772,196,000
Kab. Pasaman Barat	214,505,000	924,339,000	9,423,390,000	10,562,234,000	4,440,389,000	425,000,000	845,120,000	16,272,743,000
Kota Padang	228,360,000	643,947,000	8,538,590,000	9,410,897,000	782,722,000	-	1,469,792,000	11,663,411,000
Kota Solok	145,229,000	550,243,000	1,357,859,000	2,053,331,000	503,722,000	-	172,830,000	2,729,883,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Sawah Lunto	66,763,000	561,979,000	1,979,752,000	2,608,494,000	568,822,000	-	734,896,000	3,912,212,000
Kota Padang Panjang	145,229,000	550,243,000	1,354,899,000	2,050,371,000	461,872,000	-	451,278,000	2,963,521,000
Kota Bukit Tinggi	159,084,000	567,848,000	2,414,515,000	3,141,447,000	571,147,000	-	611,502,000	4,324,096,000
Kota Payakumbuh	163,702,000	573,716,000	2,816,349,000	3,553,767,000	622,297,000	-	611,502,000	4,787,566,000
Kota Pariaman	159,084,000	474,702,000	2,396,851,000	3,030,637,000	387,472,000	-	451,278,000	3,869,387,000
Riau					-	-	-	-
Kab. Kuantan Singingi	145,276,000	859,787,000	9,963,608,000	10,968,671,000	2,984,364,000	-	812,290,000	14,765,325,000
Kab. Indragiri Hulu	209,887,000	801,104,000	7,785,973,000	8,796,964,000	4,082,339,000	-	812,290,000	13,691,593,000
Kab. Indragiri Hilir	242,215,000	883,261,000	11,999,377,000	13,124,853,000	5,872,922,000	-	1,454,080,000	20,451,855,000
Kab. Pelalawan	94,473,000	742,421,000	5,755,873,000	6,592,767,000	4,757,739,000	-	704,790,000	12,055,296,000
Kab. Siak	215,558,000	765,894,000	6,406,639,000	7,388,091,000	4,901,314,000	-	724,790,000	13,014,195,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Kampar	182,223,000	953,681,000	15,166,130,000	16,302,034,000	8,002,047,000	-	1,449,580,000	25,753,661,000
Kab. Rokan Hulu	223,742,000	836,314,000	9,564,469,000	10,624,525,000	6,738,397,000	-	832,290,000	18,195,212,000
Kab. Bengkalis	109,381,000	718,947,000	4,918,900,000	5,747,228,000	5,184,697,000	-	788,790,000	11,720,715,000
Kab. Rokan Hilir	117,565,000	714,367,000	7,641,206,000	8,473,138,000	6,804,072,000	-	788,790,000	16,066,000,000
Kab. Kep. Meranti	100,144,000	695,474,000	4,062,570,000	4,858,188,000	1,614,339,000	-	665,290,000	7,137,817,000
Kota Pekanbaru Baru	131,421,000	632,211,000	7,413,404,000	8,177,036,000	2,550,489,000	-	832,290,000	11,559,815,000
Kota Dumai	85,237,000	585,453,000	3,710,058,000	4,380,748,000	1,061,722,000	-	-	5,442,470,000
Jambi					-	-	-	-
Kab. Kerinci	122,184,000	801,104,000	7,541,843,000	8,465,131,000	1,761,989,000	-	829,660,000	11,056,780,000
Kab. Merangin	126,802,000	812,841,000	8,776,628,000	9,716,271,000	3,189,539,000	-	829,660,000	13,735,470,000
Kab. Sarolangun	99,092,000	742,421,000	5,939,798,000	6,781,311,000	2,634,439,000	-	724,926,000	10,140,676,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Batang Hari	117,565,000	789,367,000	7,454,798,000	8,361,730,000	2,378,114,000	400,000,000	724,926,000	11,864,770,000
Kab. Muaro Jambi	209,887,000	801,104,000	7,970,366,000	8,981,357,000	3,515,039,000	-	724,926,000	13,221,322,000
Kab. Tanjung Jabung Timur	137,092,000	789,367,000	7,271,319,000	8,197,778,000	1,803,839,000	-	934,394,000	10,936,011,000
Kab. Tanjung Jabung Barat	132,473,000	777,631,000	6,707,528,000	7,617,632,000	2,792,539,000	-	829,660,000	11,239,831,000
Kab. Tebo	103,710,000	754,157,000	5,764,364,000	6,622,231,000	2,908,789,000	-	724,926,000	10,255,946,000
Kab. Bungo	122,184,000	801,104,000	7,776,650,000	8,699,938,000	3,168,614,000	-	724,926,000	12,593,478,000
Kota Jambi	131,421,000	632,211,000	7,448,301,000	8,211,933,000	752,497,000	420,000,000	1,345,118,000	10,729,548,000
Kota Sungai Penuh	66,763,000	579,584,000	3,013,651,000	3,659,998,000	464,197,000	420,000,000	515,458,000	5,059,653,000
Sumatera Selatan					-	-	-	-
Kab. Ogan Komereng Ulu	200,650,000	777,631,000	6,719,463,000	7,697,744,000	2,753,014,000	-	848,090,000	11,298,848,000
Kab. Ogan Komereng Ilir	192,513,000	930,207,000	14,034,680,000	15,157,400,000	6,779,097,000	-	1,364,222,000	23,300,719,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Muara Enim	214,505,000	812,841,000	8,727,664,000	9,755,010,000	5,216,097,000	-	1,416,596,000	16,387,703,000
Kab. Lahat	182,223,000	953,681,000	13,656,732,000	14,792,636,000	3,399,389,000	-	1,672,688,000	19,864,713,000
Kab. Musi Rawas	126,802,000	924,339,000	9,538,738,000	10,589,879,000	3,382,514,000	410,000,000	1,257,708,000	15,640,101,000
Kab. Musi Banyuasin	178,657,000	894,997,000	11,036,199,000	12,109,853,000	5,449,772,000	-	1,696,180,000	19,255,805,000
Kab. Banyuasin	192,513,000	930,207,000	13,337,995,000	14,460,715,000	3,701,639,000	-	1,634,280,000	19,796,634,000
Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	126,802,000	812,841,000	8,308,187,000	9,247,830,000	2,366,489,000	-	794,920,000	12,409,239,000
Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	140,657,000	848,051,000	10,330,096,000	11,318,804,000	5,052,772,000	-	848,090,000	17,219,666,000
Kab. Ogan Ilir	154,513,000	883,261,000	11,336,005,000	12,373,779,000	3,492,964,000	-	1,322,604,000	17,189,347,000
Kab. Empat Lawang	76,000,000	695,663,000	3,218,901,000	3,990,564,000	2,203,139,000	-	436,066,000	6,629,769,000
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	71,381,000	683,926,000	2,903,393,000	3,658,700,000	1,405,664,000	-	436,066,000	5,500,430,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Musi Rawas Utara	76,000,000	730,684,000	3,722,451,000	4,529,135,000	1,826,489,000	410,000,000	477,684,000	7,243,308,000
Kota Palembang	219,170,000	-	-	16,308,072,000	-	-	-	-
Kota Prabumulih	80,618,000	579,584,000	3,258,418,000	3,918,620,000	573,472,000	-	436,066,000	4,928,158,000
Kota Pagar Alam	71,381,000	567,848,000	2,394,493,000	3,033,722,000	757,147,000	-	348,066,000	4,138,935,000
Kota Lubuk Linggau	100,144,000	579,584,000	3,220,031,000	3,899,759,000	608,347,000	-	547,082,000	5,055,188,000
Bengkulu					-	-	-	-
Kab. Bengkulu Selatan	103,710,000	754,157,000	5,891,704,000	6,749,571,000	1,430,089,000	-	631,764,000	8,811,424,000
Kab. Rejang Lebong	136,039,000	836,314,000	9,154,417,000	10,126,770,000	1,768,389,000	-	1,373,716,000	13,268,875,000
Kab. Bengkulu Utara	160,184,000	848,051,000	10,222,933,000	11,231,168,000	2,682,114,000	420,000,000	1,283,188,000	15,616,470,000
Kab. Kaur	112,947,000	777,631,000	6,642,836,000	7,533,414,000	1,213,864,000	-	741,952,000	9,489,230,000
Kab. Seluma	140,657,000	977,154,000	10,598,083,000	11,715,894,000	1,775,364,000	420,000,000	850,562,000	14,761,820,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Muko-Muko	117,565,000	-	-	8,200,798,000	-	-	-	-
Kab. Lebong	103,710,000	754,157,000	5,640,455,000	6,498,322,000	1,222,397,000	741,952,000	8,462,671,000	
Kab. Kepahiang	103,710,000	754,157,000	5,772,884,000	6,630,751,000	1,276,639,000	477,206,000	8,384,596,000	
Kab. Bengkulu Tengah	219,123,000	824,577,000	8,240,468,000	9,284,168,000	1,190,039,000	1,048,578,000	11,522,785,000	
Kota Bengkulu	131,421,000	632,211,000	7,381,335,000	8,144,967,000	1,191,922,000	852,140,000	10,189,029,000	
Lampung					-	-	-	
Kab. Lampung Barat	201,702,000	801,104,000	5,768,167,000	6,770,973,000	2,602,464,000	1,328,366,000	11,101,803,000	
Kab. Tanggamus	164,802,000	859,787,000	10,300,669,000	11,325,258,000	2,249,664,000	1,328,366,000	15,303,288,000	
Kab. Lampung Selatan	178,657,000	894,997,000	12,672,990,000	13,746,644,000	1,340,014,000	1,534,642,000	16,621,300,000	
Kab. Lampung Timur	298,689,000	988,891,000	17,940,419,000	19,227,999,000	3,647,589,000	2,353,532,000	25,229,120,000	
Kab. Lampung Tengah	214,552,000	-	-	20,250,390,000	-	-	-	

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Lampung Utara	163,750,000	906,734,000	12,784,023,000	13,854,507,000	5,090,239,000	400,000,000	1,328,366,000	20,673,112,000
Kab. Way Kanan	126,802,000	812,841,000	8,838,619,000	9,778,262,000	3,649,889,000	-	1,328,366,000	14,756,517,000
Kab. Tulang Bawang	229,413,000	801,104,000	7,908,357,000	8,938,874,000	3,914,939,000	-	1,431,504,000	14,285,317,000
Kab. Pesawaran	94,473,000	730,684,000	5,262,091,000	6,087,248,000	2,648,964,000	-	715,752,000	9,451,964,000
Kab. Pringsewu	89,855,000	718,947,000	4,817,512,000	5,626,314,000	2,748,939,000	-	612,614,000	8,987,867,000
Kab. Mesuji	94,473,000	730,684,000	5,154,761,000	5,979,918,000	1,756,164,000	-	1,104,208,000	8,840,290,000
Kab. Tulang Bawang Barat	85,237,000	707,211,000	4,281,257,000	5,073,705,000	1,774,764,000	-	761,782,000	7,610,251,000
Kab. Pesisir Barat	80,618,000	673,289,000	4,221,686,000	4,975,593,000	1,525,989,000	400,000,000	612,614,000	7,514,196,000
Kota Bandar Lampung	177,605,000	690,894,000	11,549,880,000	12,418,379,000	715,297,000	-	1,965,076,000	15,098,752,000
Kota Metro	177,558,000	-	-	4,744,523,000	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung					-	-	-	-

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Bangka	182,176,000	730,684,000	5,048,548,000	5,961,408,000	1,260,939,000	-	739,814,000	7,962,161,000
Kab. Belitung	187,847,000	695,474,000	3,612,436,000	4,495,757,000	1,311,297,000	-	530,048,000	6,337,102,000
Kab. Bangka Barat	163,702,000	695,663,000	3,165,774,000	4,025,139,000	1,042,197,000	-	739,814,000	5,807,150,000
Kab. Bangka Tengah	76,000,000	695,663,000	3,203,997,000	3,975,660,000	1,335,914,000	-	534,980,000	5,846,554,000
Kab. Bangka Selatan	187,847,000	695,474,000	3,707,308,000	4,590,629,000	1,853,814,000	450,000,000	739,814,000	7,634,257,000
Kab. Belitung Timur	90,907,000	683,926,000	2,764,261,000	3,539,094,000	579,047,000	450,000,000	423,052,000	4,991,193,000
Kota Pangkal Pinang	80,618,000	579,584,000	3,062,107,000	3,722,309,000	489,772,000	-	630,472,000	4,842,553,000
Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Karimun	187,847,000	-	-	4,923,418,000	-	-	-	-
Kab. Bintan	123,236,000	754,157,000	6,068,229,000	6,945,622,000	717,872,000	-	690,412,000	8,353,906,000
Kab. Natuna	206,321,000	742,421,000	5,310,516,000	6,259,258,000	1,085,372,000	-	951,360,000	8,295,990,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Lingga	173,992,000	672,189,000	2,466,684,000	3,312,865,000	900,372,000	450,000,000	335,294,000	4,998,531,000
Kab. Kep. Anambas	90,907,000	683,926,000	2,676,510,000	3,451,343,000	444,297,000	-	529,938,000	4,425,578,000
Kota Batam	117,565,000	626,531,000	6,642,810,000	7,386,906,000	1,846,014,000	-	951,360,000	10,184,280,000
Kota Tanjung Pinang	66,763,000	567,848,000	2,476,457,000	3,111,068,000	420,022,000	-	444,768,000	3,975,858,000
DKI Jakarta					-	-	-	-
Kab. Kep. Seribu	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	530,320,000	930,320,000
Kota Adm. Jakarta Selatan	-	-	3,900,000,000	3,900,000,000	-	-	3,799,840,000	7,699,840,000
Kota Adm. Jakarta Timur	-	-	4,400,000,000	4,400,000,000	-	-	-	-
Kota Adm. Jakarta Pusat	-	-	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	2,325,330,000	4,425,330,000
Kota Adm. Jakarta Barat	-	-	3,750,000,000	3,750,000,000	-	-	3,694,930,000	7,444,930,000
Kota Adm. Jakarta Utara	-	-	2,450,000,000	2,450,000,000	-	-	2,220,420,000	4,670,420,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Jawa Barat					-	-	-	-
Kab. Bogor	259,265,000	1,214,235,000	40,349,847,000	41,823,347,000	18,591,372,000	-	4,694,770,000	65,109,489,000
Kab. Sukabumi	159,969,000	1,139,235,000	28,080,763,000	29,379,967,000	14,319,697,000	-	1,664,350,000	45,364,014,000
Kab. Cianjur	129,949,000	1,117,994,000	17,591,910,000	18,839,853,000	17,143,972,000	-	2,517,495,000	38,501,320,000
Kab. Bandung	169,206,000	1,214,235,000	24,251,913,000	25,635,354,000	28,994,388,000	350,000,000	3,463,439,000	58,443,181,000
Kab. Garut	176,133,000	1,214,235,000	34,384,943,000	35,775,311,000	21,012,222,000	-	3,649,037,000	60,436,570,000
Kab. Tasikmalaya	118,403,000	-	-	17,067,564,000	-	-	-	-
Kab. Ciamis	111,476,000	1,024,101,000	14,557,621,000	15,693,198,000	1,410,364,000	350,000,000	938,954,000	18,392,516,000
Kab. Kuningan	111,476,000	1,024,101,000	14,326,283,000	15,461,860,000	1,233,664,000	-	1,664,350,000	18,359,874,000
Kab. Cirebon	157,660,000	1,214,235,000	23,286,138,000	24,658,033,000	2,216,589,000	-	2,517,495,000	29,392,117,000
Kab. Majalengka	99,930,000	890,417,000	12,800,000,000	13,790,347,000	7,890,447,000	350,000,000	1,450,792,000	23,481,586,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Sumedang	99,930,000	965,417,000	12,650,818,000	13,716,165,000	1,190,639,000	-	2,837,832,000	17,744,636,000
Kab. Indramayu	139,186,000	1,089,941,000	19,608,650,000	20,837,777,000	1,738,789,000	-	1,771,129,000	24,347,695,000
Kab. Subang	118,403,000	1,059,311,000	16,236,651,000	17,414,365,000	1,535,914,000	-	2,119,667,000	21,069,946,000
Kab. Purwakarta	159,922,000	824,577,000	8,308,990,000	9,293,489,000	4,884,464,000	-	2,517,495,000	16,695,448,000
Kab. Karawang	141,495,000	1,101,678,000	20,289,260,000	21,532,433,000	2,375,839,000	-	1,557,571,000	25,465,843,000
Kab. Bekasi	116,094,000	1,047,574,000	15,877,817,000	17,041,485,000	26,442,797,000	-	2,517,495,000	46,001,777,000
Kab. Bandung Barat	97,620,000	953,681,000	11,946,604,000	12,997,905,000	12,733,422,000	-	725,396,000	26,456,723,000
Kab. Pangandaran	60,673,000	765,894,000	5,652,461,000	6,479,028,000	1,871,014,000	-	725,396,000	9,075,438,000
Kota Bogor	81,456,000	655,684,000	8,152,592,000	8,889,732,000	1,205,064,000	-	989,354,000	11,084,150,000
Kota Sukabumi	60,673,000	689,794,000	4,968,336,000	5,718,803,000	461,497,000	-	989,354,000	7,169,654,000
Kota Bandung	194,607,000			26,358,760,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		943,233,000	25,220,920,000		1,679,214,000	-	4,077,005,000	32,114,979,000
Kota Cirebon	76,837,000	643,947,000	7,508,181,000	8,228,965,000	746,422,000	-	1,336,782,000	10,312,169,000
Kota Bekasi	97,620,000	696,762,000	11,430,385,000	12,224,767,000	2,731,914,000	-	618,617,000	15,575,298,000
Kota Depok	99,930,000	702,631,000	10,972,654,000	11,775,215,000	3,175,614,000	-	1,344,013,000	16,294,842,000
Kota Cimahi	56,055,000	603,058,000	4,351,440,000	5,010,553,000	1,235,797,000	-	725,396,000	6,971,746,000
Kota Tasikmalaya	72,219,000	632,211,000	6,705,687,000	7,410,117,000	731,197,000	-	832,175,000	8,973,489,000
Kota Banjar	49,127,000	585,453,000	3,326,542,000	3,961,122,000	513,572,000	-	511,838,000	4,986,532,000
Jawa Tengah					-	-	-	-
Kab. Cilacap	214,505,000	1,035,838,000	19,002,952,000	20,253,295,000	1,691,689,000	-	1,699,963,000	23,644,947,000
Kab. Banyumas	203,797,000	1,647,574,000	18,396,065,000	20,247,436,000	7,714,922,000	400,000,000	-	28,362,358,000
Kab. Purbalingga	76,837,000			10,334,465,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		848,051,000	9,409,577,000		1,174,747,000	-	1,395,124,000	12,904,336,000
Kab. Banjarnegara	106,857,000	1,000,628,000	15,368,366,000	16,475,851,000	1,224,172,000	400,000,000	1,699,963,000	19,799,986,000
Kab. Kebumen	106,857,000	1,200,628,000	16,369,383,000	17,676,868,000	2,619,939,000	-	3,603,152,000	23,899,959,000
Kab. Purworejo	88,383,000	906,734,000	11,845,869,000	12,840,986,000	1,199,747,000	-	1,496,737,000	15,537,470,000
Kab. Wonosobo	169,159,000	871,524,000	10,076,737,000	11,117,420,000	1,060,822,000	-	1,049,408,000	13,227,650,000
Kab. Magelang	93,002,000	930,207,000	13,303,449,000	14,326,658,000	1,248,764,000	-	1,598,350,000	17,173,772,000
Kab. Boyolali	180,705,000	930,207,000	12,846,786,000	13,957,698,000	2,060,189,000	-	1,598,350,000	17,616,237,000
Kab. Klaten	192,251,000	988,891,000	15,855,682,000	17,036,824,000	1,312,522,000	-	1,699,963,000	20,049,309,000
Kab. Sukoharjo	53,745,000	730,684,000	5,156,532,000	5,940,961,000	976,522,000	-	697,562,000	7,615,045,000
Kab. Wonogiri	192,251,000	988,891,000	15,696,283,000	16,877,425,000	1,080,022,000	-	2,295,912,000	20,253,359,000
Kab. Karanganyar	74,528,000			10,165,028,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				SUB TOTAL	JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS				AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		836,314,000	9,254,186,000		1,487,064,000	-	825,305,000	12,477,397,000	
Kab. Sragen	171,468,000	883,261,000	11,310,326,000		12,365,055,000	-	1,395,124,000	14,843,676,000	
Kab. Grobogan	95,311,000	941,944,000	13,485,163,000		14,522,418,000	-	1,039,408,000	16,884,990,000	
Kab. Blora	173,777,000	894,997,000	11,254,661,000		12,323,435,000	-	1,293,511,000	14,665,568,000	
Kab. Rembang	150,685,000	777,631,000	6,805,545,000		7,733,861,000	-	799,175,000	9,360,183,000	
Kab. Pati	180,705,000	930,207,000	12,980,248,000		14,091,160,000	-	2,702,364,000	18,118,246,000	
Kab. Kudus	157,613,000	812,841,000	7,753,085,000		8,723,539,000	-	1,597,473,000	11,855,151,000	
Kab. Jepara	74,528,000	836,314,000	8,783,371,000		9,694,213,000	-	989,408,000	12,896,085,000	
Kab. Demak	88,383,000	906,734,000	11,380,037,000		12,375,154,000	-	1,598,350,000	15,164,718,000	
Kab. Semarang	86,074,000	894,997,000	12,591,148,000		13,572,219,000	-	989,408,000	15,770,674,000	
Kab. Temanggung	81,456,000				11,362,690,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		871,524,000	10,409,710,000		1,670,739,000	-	1,395,124,000	14,428,553,000
Kab. Kendal	95,311,000	941,944,000	13,226,646,000	14,263,901,000	1,194,522,000	-	1,699,963,000	17,158,386,000
Kab. Batang	162,231,000	836,314,000	8,729,501,000	9,728,046,000	1,380,114,000	-	799,175,000	11,907,335,000
Kab. Pekalongan	173,777,000	894,997,000	11,004,879,000	12,073,653,000	6,158,897,000	-	1,039,408,000	19,271,958,000
Kab. Pemalang	76,837,000	848,051,000	9,311,429,000	10,236,317,000	3,007,614,000	-	1,395,124,000	14,639,055,000
Kab. Tegal	93,002,000	930,207,000	12,551,630,000	13,574,839,000	6,625,647,000	-	1,496,737,000	21,697,223,000
Kab. Brebes	113,785,000	1,235,838,000	17,102,862,000	18,452,485,000	4,442,164,000	-	1,699,963,000	24,594,612,000
Kota Magelang	125,284,000	556,111,000	1,645,627,000	2,327,022,000	420,022,000	-	255,233,000	3,002,277,000
Kota Surakarta	65,291,000	626,531,000	5,937,943,000	6,629,765,000	624,622,000	-	1,039,408,000	8,293,795,000
Kota Salatiga	39,890,000	761,979,000	1,982,092,000	2,783,961,000	410,722,000	-	-	3,194,683,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Semarang	111,476,000	731,972,000	13,576,335,000	14,419,783,000	864,097,000	-	1,801,576,000	17,085,456,000
Kota Pekalongan	146,067,000	808,926,000	4,807,275,000	5,762,268,000	545,572,000	-	799,175,000	7,107,015,000
Kota Tegal	44,509,000	773,716,000	2,713,488,000	3,531,713,000	433,972,000	-	-	3,965,685,000
DI Yogyakarta					-	-	-	-
Kab. Kulon Progo	74,528,000	836,314,000	8,440,848,000	9,351,690,000	749,272,000	400,000,000	822,150,000	11,323,112,000
Kab. Bantul	88,383,000	906,734,000	11,170,771,000	12,165,888,000	1,188,122,000	-	1,339,626,000	14,693,636,000
Kab. Gunung Kidul	183,014,000	941,944,000	12,000,000,000	13,124,958,000	955,047,000	-	1,509,586,000	15,589,591,000
Kab. Sleman	83,765,000	883,261,000	10,529,451,000	11,496,477,000	1,937,539,000	-	-	13,434,016,000
Kota Yogyakarta	67,601,000	620,474,000	6,050,132,000	6,738,207,000	459,547,000	-	1,814,260,000	9,012,014,000
Jawa Timur					-	-	-	-

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Pacitan	169,159,000	871,524,000	9,864,382,000	10,905,065,000	1,917,189,000	-	1,486,756,000	14,309,010,000
Kab. Ponorogo	97,620,000	953,681,000	13,274,365,000	14,325,666,000	2,146,214,000	-	-	16,471,880,000
Kab. Trenggalek	164,540,000	848,051,000	9,007,863,000	10,020,454,000	1,703,289,000	-	1,698,430,000	13,422,173,000
Kab. Tulungagung	185,323,000	878,681,000	12,400,000,000	13,464,004,000	2,720,489,000	-	-	16,184,493,000
Kab. Blitar	169,159,000	871,524,000	10,037,086,000	11,077,769,000	2,642,589,000	-	1,401,616,000	15,121,974,000
Kab. Kediri	199,178,000	1,024,101,000	14,800,000,000	16,023,279,000	3,000,664,000	-	-	19,023,943,000
Kab. Malang	203,797,000	1,247,574,000	19,023,748,000	20,475,119,000	2,159,014,000	-	-	22,634,133,000
Kab. Lumajang	83,765,000	1,083,261,000	10,000,000,000	11,167,026,000	1,148,597,000	-	1,698,430,000	14,014,053,000
Kab. Jember	226,889,000	1,164,941,000	23,640,816,000	25,032,646,000	5,934,572,000	-	2,230,134,000	33,197,352,000
Kab. Banyuwangi	129,949,000	1,042,994,000	18,000,000,000	19,172,943,000	1,813,764,000	-	-	20,986,707,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Bondowoso	83,765,000	1,029,969,000	10,000,000,000	11,113,734,000	3,279,064,000	450,000,000	1,698,430,000	16,541,228,000
Kab. Situbondo	152,994,000	889,129,000	6,800,000,000	7,842,123,000	1,017,222,000	450,000,000	1,189,942,000	10,499,287,000
Kab. Probolinggo	102,239,000	977,154,000	13,200,000,000	14,279,393,000	3,138,414,000	-	-	17,417,807,000
Kab. Pasuruan	189,942,000	977,154,000	13,200,000,000	14,367,096,000	1,478,364,000	-	-	15,845,460,000
Kab. Sidoarjo	173,777,000	894,997,000	11,246,622,000	12,315,396,000	1,921,264,000	-	2,018,460,000	16,255,120,000
Kab. Mojokerto	176,086,000	906,734,000	10,800,000,000	11,882,820,000	3,051,214,000	-	1,380,919,000	16,314,953,000
Kab. Jombang	104,548,000	988,891,000	13,600,000,000	14,693,439,000	2,278,164,000	-	1,592,593,000	18,564,196,000
Kab. Nganjuk	72,219,000	824,577,000	8,702,087,000	9,598,883,000	3,219,764,000	-	1,189,942,000	14,008,589,000
Kab. Madiun	173,777,000	894,997,000	10,400,000,000	11,468,774,000	1,463,239,000	-	-	12,932,013,000
Kab. Magetan	76,837,000	848,051,000	8,800,000,000	9,724,888,000	839,947,000	450,000,000	1,380,919,000	12,395,754,000
Kab. Ngawi	169,159,000			10,640,683,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		871,524,000	9,600,000,000		1,594,014,000	-	1,380,919,000	13,615,616,000
Kab. Bojonegoro	109,166,000	1,012,364,000	14,400,000,000	15,521,530,000	1,305,547,000	-	2,230,134,000	19,057,211,000
Kab. Tuban	189,942,000	977,154,000	13,200,000,000	14,367,096,000	1,287,714,000	-	2,230,134,000	17,884,944,000
Kab. Lamongan	189,942,000	977,154,000	13,200,000,000	14,367,096,000	1,268,347,000	-	1,804,267,000	17,439,710,000
Kab. Gresik	187,632,000	965,417,000	13,707,231,000	14,860,280,000	4,171,289,000	-	1,698,430,000	20,729,999,000
Kab. Bangkalan	164,540,000	977,154,000	10,439,242,000	11,580,936,000	1,279,372,000	450,000,000	-	13,310,308,000
Kab. Sampang	162,231,000	959,549,000	8,400,000,000	9,521,780,000	1,274,722,000	450,000,000	849,215,000	12,095,717,000
Kab. Pamekasan	159,922,000	824,577,000	8,070,806,000	9,055,305,000	1,287,689,000	-	-	10,342,994,000
Kab. Sumenep	95,311,000	941,944,000	12,796,469,000	13,833,724,000	2,522,864,000	-	-	16,356,588,000
Kota Kediri	46,818,000	579,584,000	3,059,045,000	3,685,447,000	582,772,000	-	743,378,000	5,011,597,000
Kota Blitar	120,665,000	544,374,000	980,618,000	1,645,657,000	538,597,000	-	-	2,184,254,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Malang	148,376,000	614,794,000	5,218,649,000	5,981,819,000	1,222,147,000	-	1,084,105,000	8,288,071,000
Kota Probolinggo	39,890,000	561,979,000	2,029,332,000	2,631,201,000	559,522,000	-	-	3,190,723,000
Kota Pasuruan	132,211,000	573,716,000	2,721,063,000	3,426,990,000	587,422,000	-	743,378,000	4,757,790,000
Kota Mojokerto	125,284,000	556,111,000	1,635,679,000	2,317,074,000	394,447,000	-	-	2,711,521,000
Kota Madiun	39,890,000	561,979,000	1,984,691,000	2,586,560,000	403,747,000	-	-	2,990,307,000
Kota Surabaya	256,909,000	878,681,000	24,340,997,000	25,476,587,000	1,227,564,000	-	6,151,141,000	32,855,292,000
Kota Batu	37,581,000	556,111,000	1,631,311,000	2,225,003,000	482,797,000	-	637,541,000	3,345,341,000
Banten					-	350,000,000	-	350,000,000
Kab. Pandeglang	192,298,000	1,214,235,000	15,773,550,000	17,180,083,000	10,170,697,000	350,000,000	1,640,670,000	29,341,450,000
Kab. Lebak	307,711,000	1,214,235,000	17,697,517,000	19,219,463,000	10,356,122,000	-	1,640,670,000	31,216,255,000
Kab. Tangerang	224,627,000			21,268,918,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		1,094,521,000	19,949,770,000		28,588,197,000	-	1,844,888,000	51,702,003,000
Kab. Serang	169,206,000	953,681,000	13,639,901,000	14,762,788,000	11,601,147,000	-	1,436,452,000	27,800,387,000
Kota Tangerang	173,824,000	702,631,000	10,808,775,000	11,685,230,000	2,906,214,000	-	1,538,561,000	16,130,005,000
Kota Cilegon	150,685,000	573,716,000	2,617,838,000	3,342,239,000	975,697,000	-	408,348,000	4,726,284,000
Kota Serang	187,632,000	620,663,000	5,413,293,000	6,221,588,000	2,415,639,000	-	682,056,000	9,319,283,000
Kota Tangerang Selatan	141,495,000	661,552,000	8,051,286,000	8,854,333,000	922,222,000	-	1,325,282,000	11,101,837,000
Bali					-	-	-	-
Kab. Jembrana	72,219,000	707,211,000	3,899,753,000	4,679,183,000	581,272,000	-	466,346,000	5,726,801,000
Kab. Tabanan	118,403,000	824,577,000	8,742,558,000	9,685,538,000	689,397,000	-	894,180,000	11,269,115,000
Kab. Badung	86,074,000	667,421,000	4,920,969,000	5,674,464,000	1,337,089,000	-	1,004,388,000	8,015,941,000
Kab. Gianyar	173,777,000	742,421,000	5,675,704,000	6,591,902,000	1,094,522,000	-	873,180,000	8,559,604,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Klungkung	67,601,000	620,474,000	3,437,479,000	4,125,554,000	592,897,000	-	752,972,000	5,471,423,000
Kab. Bangli	81,456,000	730,684,000	4,754,591,000	5,566,731,000	843,997,000	-	588,764,000	6,999,492,000
Kab. Karang Asem	169,159,000	655,684,000	4,800,000,000	5,624,843,000	950,947,000	-	752,972,000	7,328,762,000
Kab. Buleleng	206,106,000	824,577,000	8,765,252,000	9,795,935,000	907,947,000	-	1,004,388,000	11,708,270,000
Kota Denpasar	76,837,000	591,321,000	3,803,669,000	4,471,827,000	652,522,000	-	752,972,000	5,877,321,000
Nusa Tenggara Barat					-	-	-	-
Kab. Lombok Barat	192,251,000	889,129,000	8,465,724,000	9,547,104,000	1,755,014,000	-	1,458,168,000	12,760,286,000
Kab. Lombok Tengah	229,198,000	1,029,969,000	13,817,415,000	15,076,582,000	5,456,747,000	-	1,678,239,500	22,211,568,500
Kab. Lombok Timur	247,672,000	1,100,389,000	14,500,000,000	15,848,061,000	2,071,814,000	450,000,000	2,566,968,000	20,936,843,000
Kab. Sumbawa	141,495,000	1,029,969,000	12,621,828,000	13,793,292,000	4,767,864,000	-	2,012,066,000	20,573,222,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Dompu	155,303,000	748,289,000	4,502,054,000	5,405,646,000	1,975,639,000	450,000,000	783,482,000	8,614,767,000
Kab. Bima	206,106,000	941,944,000	9,665,319,000	10,813,369,000	3,661,314,000	-	894,757,500	15,369,440,500
Kab. Sumbawa Barat	67,601,000	748,289,000	4,389,116,000	5,205,006,000	1,712,914,000	450,000,000	672,206,500	8,040,126,500
Kab. Lombok Utara	150,685,000	730,684,000	3,728,898,000	4,610,267,000	2,173,814,000	450,000,000	783,482,000	8,017,563,000
Kota Mataram	164,540,000	591,321,000	3,909,811,000	4,665,672,000	1,094,272,000	-	1,006,033,000	6,765,977,000
Kota Bima	136,830,000	556,111,000	1,747,091,000	2,440,032,000	617,647,000	-	672,206,500	3,729,885,500
Nusa Tenggara Timur					-	-	-	-
Kab. Sumba Barat	97,416,000	713,079,000	3,500,000,000	4,310,495,000	2,038,689,000	475,000,000	812,066,000	7,636,250,000
Kab. Sumba Timur	166,692,000	977,154,000	12,941,024,000	14,084,870,000	3,742,939,000	-	1,327,944,000	19,155,753,000
Kab. Kupang	217,710,000	1,047,574,000	18,337,058,000	19,602,342,000	4,113,739,000	475,000,000	-	24,191,081,000
Kab. Timor	291,342,000			16,409,336,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Tengah Selatan		1,117,994,000	15,000,000,000		5,207,397,000	-	2,805,480,000	24,422,213,000
Kab. Timor Tengah Utara	272,869,000	1,047,574,000	16,514,935,000	17,835,378,000	2,646,689,000	475,000,000	-	20,957,067,000
Kab. Belu	143,600,000	889,129,000	11,750,336,000	12,783,065,000	2,211,439,000	-	944,066,000	15,938,570,000
Kab. Alor	208,473,000	1,012,364,000	15,771,954,000	16,992,791,000	3,009,814,000	475,000,000	944,066,000	21,421,671,000
Kab. Lembata	139,197,000	748,289,000	4,500,000,000	5,387,486,000	1,908,439,000	-	688,972,000	7,984,897,000
Kab. Flores Timur	157,456,000	824,577,000	11,002,224,000	11,984,257,000	3,019,314,000	475,000,000	-	15,478,571,000
Kab. Sikka	171,311,000	859,787,000	11,288,304,000	12,319,402,000	3,745,814,000	-	-	16,065,216,000
Kab. Ende	175,929,000	1,012,364,000	12,000,000,000	13,188,293,000	3,242,689,000	-	812,066,000	17,243,048,000
Kab. Ngada	129,745,000	754,157,000	6,611,484,000	7,495,386,000	2,195,064,000	-	688,972,000	10,379,422,000
Kab. Manggarai	162,074,000	959,549,000	14,193,649,000	15,315,272,000	4,487,564,000	-	1,624,132,000	21,426,968,000
Kab. Rote Ndao	208,211,000	801,104,000	7,594,263,000	8,603,578,000	2,425,939,000	475,000,000	-	11,504,517,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Manggarai Barat	254,610,000	853,919,000	7,500,000,000	8,608,529,000	3,917,189,000	-	812,066,000	13,337,784,000
Kab. Sumba Tengah	102,035,000	730,684,000	4,000,000,000	4,832,719,000	1,299,814,000	475,000,000	493,878,000	7,101,411,000
Kab. Sumba Barat Daya	111,271,000	765,894,000	5,000,000,000	5,877,165,000	5,481,922,000	475,000,000	-	11,834,087,000
Kab. Nagekeo	97,416,000	713,079,000	3,500,000,000	4,310,495,000	1,912,189,000	475,000,000	-	6,697,684,000
Kab. Manggarai Timur	166,692,000	977,154,000	11,000,000,000	12,143,846,000	3,880,939,000	475,000,000	-	16,499,785,000
Kab. Sabu Raijua	92,798,000	695,474,000	3,573,461,000	4,361,733,000	1,561,439,000	475,000,000	327,279,000	6,725,451,000
Kab. Malaka	143,600,000	889,129,000	11,108,739,000	12,141,468,000	2,116,564,000	475,000,000	-	14,733,032,000
Kota Kupang	203,593,000	591,321,000	4,508,746,000	5,303,660,000	1,467,039,000	475,000,000	-	7,245,699,000
Kalimantan Barat					-	-	-	-
Kab. Sambas	290,505,000	1,065,179,000	18,136,441,000	19,492,125,000	5,872,022,000	-	1,605,700,000	26,969,847,000
Kab. Bengkayang	156,618,000			11,779,238,000				

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
		889,129,000	10,733,491,000		2,515,289,000	450,000,000	874,480,000	15,619,007,000
Kab. Landak	151,999,000	871,524,000	10,791,514,000	11,815,037,000	3,687,814,000	450,000,000	852,740,000	16,805,591,000
Kab. Mempawah	142,763,000	754,157,000	6,965,064,000	7,861,984,000	2,348,464,000	-	852,740,000	11,063,188,000
Kab. Sanggau	248,939,000	801,104,000	9,165,294,000	10,215,337,000	4,631,339,000	-	874,480,000	15,721,156,000
Kab. Ketapang	188,947,000	1,012,364,000	12,000,000,000	13,201,311,000	5,147,514,000	-	2,558,220,000	20,907,045,000
Kab. Sintang	170,473,000	941,944,000	13,155,532,000	14,267,949,000	4,450,964,000	-	1,748,960,000	20,467,873,000
Kab. Kapuas Hulu	184,328,000	994,759,000	15,234,578,000	16,413,665,000	2,749,914,000	450,000,000	2,035,480,000	21,649,059,000
Kab. Sekadau	133,526,000	730,684,000	5,787,506,000	6,651,716,000	2,125,464,000	-	632,220,000	9,409,400,000
Kab. Melawi	128,907,000	783,499,000	5,500,000,000	6,412,406,000	2,167,089,000	450,000,000	468,960,000	9,498,455,000
Kab. Kayong Utara	115,052,000	730,684,000	4,000,000,000	4,845,736,000	1,392,839,000	450,000,000	632,220,000	7,320,795,000
Kab. Kubu Raya	170,473,000	824,577,000	9,647,661,000	10,642,711,000	4,796,114,000	-	837,740,000	16,276,565,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Pontianak	158,293,000	649,816,000	9,501,936,000	10,310,045,000	580,447,000	837,740,000	-	11,728,232,000
Kota Singkawang	75,162,000	556,111,000	1,933,260,000	2,564,533,000	738,547,000	730,480,000	-	4,033,560,000
Kalimantan Tengah					-	-	-	-
Kab. Kotawaringin Barat	239,702,000	777,631,000	7,666,432,000	8,683,765,000	2,648,389,000	628,140,000	-	11,960,294,000
Kab. Kotawaringin Timur	170,473,000	749,577,000	9,488,771,000	10,408,821,000	3,956,789,000	1,515,720,000	-	15,881,330,000
Kab. Kapuas	285,886,000	894,997,000	11,963,459,000	13,144,342,000	3,557,464,000	757,860,000	-	17,459,666,000
Kab. Barito Selatan	221,229,000	730,684,000	5,416,929,000	6,368,842,000	1,528,839,000	628,140,000	-	8,525,821,000
Kab. Barito Utara	239,702,000	777,631,000	7,333,573,000	8,350,906,000	1,492,789,000	757,860,000	-	10,601,555,000
Kab. Sukamara	188,900,000	585,453,000	1,995,998,000	2,770,351,000	993,747,000	365,315,000	-	4,129,413,000
Kab. Lamandau	216,610,000	718,947,000	4,584,903,000	5,520,460,000	1,132,522,000	475,035,000	-	7,128,017,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Seruyan	221,229,000	801,104,000	6,439,402,000	7,461,735,000	2,192,064,000	-	628,140,000	10,281,939,000
Kab. Katingan	151,999,000	777,631,000	7,212,598,000	8,142,228,000	1,989,514,000	-	757,860,000	10,889,602,000
Kab. Pulang Pisau	216,610,000	643,947,000	4,838,275,000	5,698,832,000	1,384,539,000	-	475,035,000	7,558,406,000
Kab. Gunung Mas	235,084,000	765,894,000	7,102,442,000	8,103,420,000	1,523,314,000	450,000,000	1,406,000,000	11,482,734,000
Kab. Barito Timur	128,907,000	718,947,000	5,008,273,000	5,856,127,000	1,395,639,000	-	599,755,000	7,851,521,000
Kab. Murung Raya	142,763,000	679,157,000	6,383,967,000	7,205,887,000	1,576,039,000	-	867,580,000	9,649,506,000
Kota Palangkaraya	98,254,000	585,453,000	3,852,944,000	4,536,651,000	1,263,997,000	-	590,755,000	6,391,403,000
Kalimantan Selatan					-	-	-	-
Kab. Tanah Laut	227,522,000	812,841,000	8,986,492,000	10,026,855,000	3,610,139,000	-	1,401,090,000	15,038,084,000
Kab. Kota Baru	290,505,000	906,734,000	12,412,923,000	13,610,162,000	3,295,339,000	-	1,737,180,000	18,642,681,000
Kab. Banjar	250,615,000	871,524,000	11,661,258,000	12,783,397,000	4,649,064,000	-	1,324,090,000	18,756,551,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Barito Kuala	253,557,000	812,841,000	8,833,892,000	9,900,290,000	2,659,439,000	-	853,590,000	13,413,319,000
Kab. Tapin	199,812,000	742,421,000	5,775,688,000	6,717,921,000	1,685,839,000	-	756,560,000	9,160,320,000
Kab. Hulu Sungai Selatan	236,759,000	836,314,000	10,390,793,000	11,463,866,000	2,289,264,000	-	1,375,090,000	15,128,220,000
Kab. Hulu Sungai Tengah	227,522,000	812,841,000	8,962,446,000	10,002,809,000	2,480,714,000	-	644,530,000	13,128,053,000
Kab. Hulu Sungai Utara	225,847,000	818,709,000	6,926,554,000	7,971,110,000	2,117,164,000	450,000,000	868,590,000	11,406,864,000
Kab. Tabalong	125,964,000	777,631,000	7,209,705,000	8,113,300,000	2,039,464,000	-	756,560,000	10,909,324,000
Kab. Tanah Bumbu	204,430,000	754,157,000	6,478,743,000	7,437,330,000	4,012,489,000	-	644,530,000	12,094,349,000
Kab. Balangan	190,575,000	718,947,000	4,827,183,000	5,736,705,000	1,517,739,000	-	868,590,000	8,123,034,000
Kota Banjarmasin	259,851,000	667,421,000	10,628,221,000	11,555,493,000	882,697,000	-	486,110,000	12,924,300,000
Kota Banjar Baru	176,720,000	573,716,000	2,981,031,000	3,731,467,000	468,847,000	-	486,110,000	4,686,424,000
Kalimantan Timur					-	-	-	-

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Paser	156,618,000	789,367,000	8,165,969,000	9,111,954,000	3,028,514,000	-	895,140,000	13,035,608,000
Kab. Kutai Barat	161,236,000	801,104,000	8,461,871,000	9,424,211,000	1,669,689,000	-	880,140,000	11,974,040,000
Kab. Kutai Kartanegara	216,657,000	941,944,000	14,377,016,000	15,535,617,000	7,558,622,000	-	1,647,230,000	24,741,469,000
Kab. Kutai Timur	165,855,000	812,841,000	8,990,069,000	9,968,765,000	3,570,914,000	-	767,090,000	14,306,769,000
Kab. Berau	156,618,000	714,367,000	7,425,650,000	8,296,635,000	2,681,039,000	-	1,673,130,000	12,650,804,000
Kab. Penajam Paser Utara	102,872,000	643,947,000	5,423,699,000	6,170,518,000	1,286,339,000	-	663,040,000	8,119,897,000
Kab. Mahakam Hulu	101,197,000	614,794,000	2,825,060,000	3,541,051,000	468,147,000	450,000,000	298,100,000	4,757,298,000
Kota Balikpapan	176,767,000	673,289,000	9,760,662,000	10,610,718,000	2,324,964,000	-	1,534,180,000	14,469,862,000
Kota Samarinda	162,912,000	655,684,000	9,991,315,000	10,809,911,000	1,808,814,000	-	993,190,000	13,611,915,000
Kota Bontang	79,780,000	561,979,000	2,145,155,000	2,786,914,000	978,022,000	-	-	3,764,936,000
Kalimantan Utara					-	-	-	-

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Malinau	112,109,000	742,421,000	6,459,229,000	7,313,759,000	1,199,147,000	-	899,890,000	9,412,796,000
Kab. Bulungan	133,526,000	730,684,000	5,529,906,000	6,394,116,000	1,448,364,000	-	515,190,000	8,357,670,000
Kab. Tana Tidung	70,544,000	648,716,000	1,503,286,000	2,222,546,000	446,497,000	-	325,730,000	2,994,773,000
Kab. Nunukan	138,144,000	818,709,000	8,568,409,000	9,525,262,000	2,000,589,000	450,000,000	752,040,000	12,727,891,000
Kota Tarakan	84,399,000	567,848,000	2,571,356,000	3,223,603,000	798,997,000	-	-	4,022,600,000
Sulawesi Utara					-	-	-	-
Kab. Bolaang Mongondow	125,964,000	777,631,000	6,884,052,000	7,787,647,000	2,069,464,000	450,000,000	760,110,000	11,067,221,000
Kab. Minahasa	149,057,000	836,314,000	9,605,464,000	10,590,835,000	1,435,914,000	-	875,110,000	12,901,859,000
Kab. Kepulauan Sangihe	151,999,000	777,631,000	8,038,156,000	8,967,786,000	1,301,822,000	-	753,110,000	11,022,718,000
Kab. Kepulauan Talaud	175,091,000	761,314,000	10,298,139,000	11,234,544,000	1,218,622,000	460,000,000	904,110,000	13,817,276,000
Kab. Minahasa Selatan	130,583,000	789,367,000	7,896,098,000	8,816,048,000	1,870,214,000	-	760,110,000	11,446,372,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Minahasa Utara	102,872,000	718,947,000	5,283,307,000	6,105,126,000	1,271,272,000	-	-	7,376,398,000
Kab. Bolaang Mongondow Utara	102,872,000	718,947,000	4,685,833,000	5,507,652,000	1,121,422,000	-	452,110,000	7,081,184,000
Kab. Siau Tagulandang Biaro	138,144,000	742,421,000	6,534,037,000	7,414,602,000	688,547,000	460,000,000	524,110,000	9,087,259,000
Kab. Minahasa Tenggara	107,491,000	655,684,000	5,400,514,000	6,163,689,000	1,315,672,000	-	760,110,000	8,239,471,000
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	84,399,000	683,926,000	2,921,687,000	3,690,012,000	1,063,122,000	-	452,110,000	5,205,244,000
Kab. Bolaang Mongondow Timur	75,162,000	660,453,000	2,030,093,000	2,765,708,000	807,822,000	-	-	3,573,530,000
Kota Manado	125,964,000	620,663,000	6,183,418,000	6,930,045,000	594,397,000	430,000,000	875,110,000	8,829,552,000
Kota Bitung	93,636,000	579,584,000	3,390,303,000	4,063,523,000	889,672,000	-	452,110,000	5,405,305,000
Kota Tomohon	84,399,000	567,848,000	2,605,832,000	3,258,079,000	399,172,000	-	452,110,000	4,109,361,000
Kota Kotamobago	75,162,000	556,111,000	1,793,098,000	2,424,371,000	552,547,000	-	-	2,976,918,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Sulawesi Tengah					-	-	-	-
Kab. Banggai Kepulauan	225,847,000	818,709,000	6,819,202,000	7,863,758,000	1,445,614,000	450,000,000	648,780,000	10,408,152,000
Kab. Banggai	276,649,000	871,524,000	11,831,755,000	12,979,928,000	3,721,164,000	-	256,110,000	16,957,202,000
Kab. Morowali	207,373,000	695,474,000	4,155,591,000	5,058,438,000	1,481,664,000	-	639,780,000	7,179,882,000
Kab. Poso	236,759,000	836,314,000	9,983,427,000	11,056,500,000	2,605,614,000	-	981,450,000	14,643,564,000
Kab. Donggala	209,049,000	853,919,000	8,307,659,000	9,370,627,000	3,510,214,000	450,000,000	639,780,000	13,970,621,000
Toli-Toli	204,430,000	836,314,000	7,588,802,000	8,629,546,000	2,588,914,000	-	543,890,000	11,762,350,000
Kab. Buol	190,575,000	783,499,000	6,050,465,000	7,024,539,000	2,006,139,000	-	-	9,030,678,000
Kab. Parigi Moutong	236,759,000	959,549,000	11,990,070,000	13,186,378,000	5,150,497,000	-	759,670,000	19,096,545,000
Kab. Tojo Una- Una	225,847,000	818,709,000	6,588,964,000	7,633,520,000	1,859,089,000	450,000,000	588,780,000	10,531,389,000
Kab. Sigi	227,522,000	924,339,000	11,417,030,000	12,568,891,000	2,552,864,000	450,000,000	981,450,000	16,553,205,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Banggai Laut	188,900,000	689,794,000	2,988,424,000	3,867,118,000	1,204,647,000	450,000,000	384,000,000	5,905,765,000
Kab. Morowali Utara	195,194,000	801,104,000	6,000,000,000	6,996,298,000	1,545,489,000	-	-	8,541,787,000
Kota Palu	195,194,000	597,189,000	4,674,879,000	5,467,262,000	945,472,000	430,000,000	579,780,000	7,422,514,000
Provinsi Sulawesi Selatan					-	-	-	-
Kab. Kepulauan Selayar	142,763,000	754,157,000	6,556,395,000	7,453,315,000	1,614,889,000	-	786,330,000	9,854,534,000
Kab. Bulukumba	144,438,000	824,577,000	9,602,210,000	10,571,225,000	1,664,864,000	-	786,330,000	13,022,419,000
Kab. Bantaeng	112,109,000	742,421,000	5,704,577,000	6,559,107,000	605,297,000	450,000,000	631,070,000	8,245,474,000
Kab. Jeneponto	135,201,000	906,734,000	9,997,867,000	11,039,802,000	1,601,039,000	-	774,330,000	13,415,171,000
Kab. Takalar	121,346,000	765,894,000	7,193,926,000	8,081,166,000	2,841,439,000	-	887,590,000	11,810,195,000
Kab. Gowa	167,530,000	883,261,000	12,654,596,000	13,705,387,000	3,818,314,000	-	1,435,400,000	18,959,101,000
Kab. Sinjai	125,964,000	777,631,000	7,518,720,000	8,422,315,000	1,395,664,000	-	774,330,000	10,592,309,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Maros	116,728,000	754,157,000	6,813,549,000	7,684,434,000	3,310,414,000	-	774,330,000	11,769,178,000
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	184,328,000	859,787,000	11,304,495,000	12,348,610,000	3,377,064,000	-	887,590,000	16,613,264,000
Kab. Barru	107,491,000	730,684,000	5,569,135,000	6,407,310,000	968,797,000	-	774,330,000	8,150,437,000
Kab. Bone	227,570,000	1,035,838,000	20,684,364,000	21,947,772,000	1,553,989,000	-	1,688,920,000	25,190,681,000
Kab. Soppeng	218,286,000	714,367,000	7,979,570,000	8,912,223,000	785,697,000	-	786,330,000	10,484,250,000
Kab. Wajo	158,293,000	859,787,000	11,076,157,000	12,094,237,000	932,797,000	-	887,590,000	13,914,624,000
Kab. Sidenreng Rappang	116,728,000	754,157,000	6,593,407,000	7,464,292,000	2,020,039,000	-	786,330,000	10,270,661,000
Kab. Pinrang	125,964,000	777,631,000	7,718,026,000	8,621,621,000	3,463,039,000	-	1,548,660,000	13,633,320,000
Kab. Enrekang	199,812,000	742,421,000	6,059,667,000	7,001,900,000	1,321,247,000	-	1,258,600,000	9,581,747,000
Kab. Luwu	149,057,000	836,314,000	10,131,138,000	11,116,509,000	4,029,189,000	-	1,572,660,000	16,718,358,000
Kab. Tana Toraja	149,057,000	836,314,000	10,020,169,000	11,005,540,000	1,675,989,000	-	1,340,140,000	14,021,669,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Luwu Utara	116,728,000	754,157,000	6,753,503,000	7,624,388,000	846,722,000	-	660,070,000	9,131,180,000
Kab. Luwu Timur	173,416,000	765,894,000	7,331,829,000	8,271,139,000	1,213,022,000	-	902,590,000	10,386,751,000
Kab. Toraja Utara	167,530,000	883,261,000	12,713,353,000	13,764,144,000	868,997,000	-	1,456,400,000	16,089,541,000
Kota Makassar	250,662,000	767,182,000	18,300,729,000	19,318,573,000	1,618,164,000	-	1,921,440,000	22,858,177,000
Kota Pare-pare	79,780,000	561,979,000	2,216,919,000	2,858,678,000	738,547,000	-	-	3,597,225,000
Kota Palopo	107,491,000	597,189,000	4,624,088,000	5,328,768,000	959,422,000	-	766,330,000	7,054,520,000
Sulawesi Tenggara					-	-	-	-
Kab. Buton	138,144,000	742,421,000	6,172,859,000	7,053,424,000	3,746,089,000	-	428,137,000	11,227,650,000
Kab. Muna	202,802,000	906,734,000	12,617,932,000	13,727,468,000	3,299,989,000	450,000,000	1,623,434,000	19,100,891,000
Kab. Konawe	162,912,000	937,364,000	12,665,728,000	13,766,004,000	2,647,239,000	-	571,043,000	16,984,286,000
Kab. Kolaka	195,194,000	730,684,000	5,368,483,000	6,294,361,000	2,039,814,000	-	571,043,000	8,905,218,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Konawe Selatan	158,293,000	859,787,000	10,541,529,000	11,559,609,000	3,195,939,000	-	981,076,000	15,736,624,000
Kab. Bombana	179,710,000	977,154,000	11,190,115,000	12,346,979,000	2,012,514,000	450,000,000	571,043,000	15,380,536,000
Kab. Wakatobi	170,473,000	824,577,000	9,149,950,000	10,145,000,000	1,268,039,000	-	428,137,000	11,841,176,000
Kab. Kolaka Utara	151,999,000	777,631,000	7,268,219,000	8,197,849,000	1,583,539,000	-	755,264,000	10,536,652,000
Kab. Buton Utara	98,254,000	707,211,000	4,251,478,000	5,056,943,000	1,029,997,000	-	315,231,000	6,402,171,000
Kab. Konawe Utara	121,346,000	765,894,000	6,468,785,000	7,356,025,000	1,038,722,000	-	755,264,000	9,150,011,000
Kab. Kolaka Timur	112,109,000	742,421,000	5,777,512,000	6,632,042,000	1,850,914,000	-	755,264,000	9,238,220,000
Kab. Konawe Kepulauan	110,434,000	713,079,000	3,434,479,000	4,257,992,000	702,747,000	450,000,000	315,231,000	5,725,970,000
Kab. Muna Barat	121,346,000	765,894,000	7,104,962,000	7,992,202,000	1,050,347,000	-	428,137,000	9,470,686,000
Kab. Buton Tengah	107,491,000	655,684,000	5,631,944,000	6,395,119,000	1,282,372,000	-	428,137,000	8,105,628,000
Kab. Buton Selatan	89,017,000	620,663,000	3,754,629,000	4,464,309,000	1,151,922,000	-	428,137,000	6,044,368,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kota Kendari	121,346,000	614,794,000	5,665,374,000	6,401,514,000	1,188,039,000	-	743,264,000	8,332,817,000
Kota Bau-Bau	156,618,000	626,531,000	6,193,482,000	6,976,631,000	982,672,000	-	562,043,000	8,521,346,000
Gorontalo					-	470,000,000	-	470,000,000
Boalemo	102,872,000	783,499,000	5,557,692,000	6,444,063,000	1,253,197,000	-	833,460,000	8,530,720,000
Kab. Gorontalo	149,057,000	836,314,000	10,657,676,000	11,643,047,000	1,403,364,000	-	833,460,000	13,879,871,000
Kab. Pohuwato	125,964,000	871,524,000	7,928,873,000	8,926,361,000	1,185,197,000	-	725,510,000	10,837,068,000
Kab. Bone Bolango	232,141,000	824,577,000	9,183,760,000	10,240,478,000	1,219,497,000	-	833,460,000	12,293,435,000
Kab. Gorontalo Utara	121,346,000	853,919,000	7,736,021,000	8,711,286,000	536,522,000	470,000,000	833,460,000	10,551,268,000
Kota Gorontalo	98,254,000	585,453,000	3,703,376,000	4,387,083,000	438,622,000	-	725,510,000	5,551,215,000
Sulawesi Barat					-	-	-	-
Kab. Majene	102,872,000	718,947,000	5,159,718,000	5,981,537,000	1,492,764,000	-	869,880,000	8,344,181,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Polewali Mandar	144,438,000	941,944,000	11,172,318,000	12,258,700,000	3,052,364,000	-	2,383,540,000	17,694,604,000
Kab. Mamasa	130,583,000	789,367,000	8,611,901,000	9,531,851,000	1,972,889,000	450,000,000	1,185,220,000	13,139,960,000
Kab. Mamuju	153,675,000	848,051,000	11,182,380,000	12,184,106,000	3,735,039,000	-	1,400,610,000	17,319,755,000
Kab. Mamuju Utara	116,728,000	679,157,000	6,047,281,000	6,843,166,000	2,419,639,000	450,000,000	756,830,000	10,469,635,000
Kab. Mamuju Tengah	98,254,000	765,894,000	5,237,647,000	6,101,795,000	1,739,739,000	450,000,000	439,560,000	8,731,094,000
Maluku					-	-	-	-
Kab. Maluku Tenggara Barat	157,670,000	818,709,000	8,747,993,000	9,724,372,000	1,750,864,000	580,000,000	733,960,000	12,789,196,000
Kab. Maluku Tenggara	166,907,000	765,894,000	8,205,069,000	9,137,870,000	1,517,764,000	-	874,200,000	11,529,834,000
Kab. Maluku Tengah	250,039,000	1,170,809,000	24,370,852,000	25,791,700,000	4,520,439,000	-	1,888,640,000	32,200,779,000
Kab. Buru	139,197,000	748,289,000	5,639,010,000	6,526,496,000	1,931,214,000	-	593,720,000	9,051,430,000
Kab. Kepulauan Aru	208,473,000	1,012,364,000	16,217,623,000	17,438,460,000	1,606,614,000	580,000,000	874,200,000	20,499,274,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Seram Bagian Barat	176,144,000	814,129,000	10,200,000,000	11,190,273,000	2,563,964,000	-	874,200,000	14,628,437,000
Kab. Seram Bagian Timur	185,381,000	849,339,000	11,400,000,000	12,434,720,000	1,761,989,000	580,000,000	1,014,440,000	15,791,149,000
Kab. Maluku Barat Daya	189,999,000	941,944,000	13,476,140,000	14,608,083,000	1,256,939,000	580,000,000	1,214,440,000	17,659,462,000
Kab. Buru Selatan	153,052,000	801,104,000	6,426,503,000	7,380,659,000	1,321,222,000	580,000,000	718,960,000	10,000,841,000
Kota Ambon	166,692,000	643,947,000	9,456,349,000	10,266,988,000	1,815,789,000	-	854,200,000	12,936,977,000
Kota Tual	134,364,000	614,794,000	5,928,420,000	6,677,578,000	743,422,000	580,000,000	718,960,000	8,719,960,000
Maluku Utara					-	-	-	-
Kab. Halmahera Barat	236,136,000	783,499,000	7,163,129,000	8,182,764,000	1,356,964,000	-	337,561,000	9,877,289,000
Kab. Halmahera Tengah	148,434,000	643,947,000	5,368,114,000	6,160,495,000	1,086,397,000	580,000,000	513,852,000	8,340,744,000
Kab. Kepulauan Sula	148,434,000	783,499,000	6,050,025,000	6,981,958,000	1,402,164,000	-	-	8,384,122,000
Kab. Halmahera Selatan	328,505,000	1,135,599,000	18,844,228,000	20,308,332,000	3,230,639,000	-	337,561,000	23,876,532,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Halmahera Utara	176,144,000	789,367,000	8,567,179,000	9,532,690,000	2,412,664,000	-	337,561,000	12,282,915,000
Kab. Halmahera Timur	249,992,000	836,314,000	8,400,000,000	9,486,306,000	1,367,839,000	580,000,000	-	11,434,145,000
Kab. Pulau Morotai	213,044,000	620,474,000	3,855,552,000	4,689,070,000	1,160,272,000	580,000,000	-	6,429,342,000
Kab. Pulau Taliabu	125,341,000	620,474,000	3,264,514,000	4,010,329,000	1,061,397,000	580,000,000	-	5,651,726,000
Kota Ternate	143,815,000	585,453,000	3,914,949,000	4,644,217,000	1,054,747,000	-	-	5,698,964,000
Kota Tidore Kepulauan	143,815,000	585,453,000	3,775,724,000	4,504,992,000	722,272,000	-	-	5,227,264,000
Papua Barat					-	-	-	-
Kab. Fak-Fak	176,359,000	632,211,000	5,004,896,000	5,813,466,000	1,181,289,000	580,000,000	836,218,000	8,410,973,000
Kab. Kaimana	167,122,000	620,663,000	3,751,648,000	4,539,433,000	1,146,747,000	580,000,000	836,218,000	7,102,398,000
Kab. Teluk Wondama	157,886,000	620,474,000	3,600,000,000	4,378,360,000	873,072,000	580,000,000	609,192,000	6,440,624,000
Kab. Teluk Bintuni	222,543,000	866,944,000	11,332,397,000	12,421,884,000	1,286,322,000	-	2,445,540,000	16,153,746,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Manokwari	190,215,000	742,421,000	6,661,335,000	7,593,971,000	2,199,514,000	-	1,550,226,000	11,343,711,000
Kab. Sorong Selatan	199,451,000	853,919,000	9,959,817,000	11,013,187,000	1,073,747,000	-	1,550,226,000	13,637,160,000
Kab. Sorong	143,601,000	889,129,000	10,308,862,000	11,341,592,000	1,317,389,000	560,000,000	1,001,244,000	14,220,225,000
Kab. Raja Ampat	185,381,000	924,339,000	12,584,053,000	13,693,773,000	1,138,722,000	-	701,542,000	15,534,037,000
Kab. Tambrauw	176,359,000	690,894,000	5,426,663,000	6,293,916,000	587,097,000	-	426,161,000	7,307,174,000
Kab. Maybrat	194,833,000	836,314,000	7,684,724,000	8,715,871,000	701,672,000	-	1,001,244,000	10,418,787,000
Kab. Manokwari Selatan	148,649,000	573,716,000	1,948,508,000	2,670,873,000	474,847,000	-	621,542,000	3,767,262,000
Kab. Pegunungan Arfak	171,741,000	620,474,000	4,372,988,000	5,165,203,000	710,497,000	-	-	5,875,700,000
Kota Sorong	157,886,000	561,979,000	2,449,269,000	3,169,134,000	1,273,297,000	-	-	4,442,431,000
Papua					-	-	-	-
Kab. Merauke	222,543,000	941,944,000	15,238,460,000	16,402,947,000	2,962,514,000	-	970,718,000	20,336,179,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Jayawijaya	277,917,000	818,709,000	8,389,652,000	9,486,278,000	2,054,989,000	-	685,692,000	12,226,959,000
Kab. Jayapura	305,627,000	737,841,000	10,417,610,000	11,461,078,000	1,812,464,000	-	850,718,000	14,124,260,000
Kab. Nabire	337,956,000	1,047,574,000	16,458,742,000	17,844,272,000	2,037,739,000	-	1,015,744,000	20,897,755,000
Kab. Kepulauan Yapen	157,670,000	801,104,000	7,559,228,000	8,518,002,000	1,510,714,000	-	1,015,744,000	11,044,460,000
Kab. Biak Numfor	301,009,000	831,734,000	10,800,000,000	11,932,743,000	2,101,514,000	-	850,718,000	14,884,975,000
Kab. Paniai	301,009,000	906,734,000	10,800,000,000	12,007,743,000	2,012,339,000	-	685,692,000	14,705,774,000
Kab. Puncak Jaya	254,825,000	655,684,000	4,800,000,000	5,710,509,000	1,346,939,000	580,000,000	850,718,000	8,488,166,000
Kab. Mimika	277,917,000	742,421,000	7,234,190,000	8,254,528,000	3,023,614,000	-	685,692,000	11,963,834,000
Kab. Boven Digoel	310,246,000	866,944,000	10,997,269,000	12,174,459,000	1,311,239,000	580,000,000	765,692,000	14,831,390,000
Kab. Mappi	236,136,000	783,499,000	6,805,181,000	7,824,816,000	1,762,464,000	-	850,718,000	10,437,998,000
Kab. Asmat	245,373,000	818,709,000	8,849,532,000	9,913,614,000	1,910,464,000	580,000,000	685,692,000	13,089,770,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Yahukimo	361,048,000	1,060,599,000	18,600,000,000	20,021,647,000	1,939,739,000	-	685,692,000	22,647,078,000
Kab. Peg. Bintang	351,812,000	1,025,389,000	18,236,621,000	19,613,822,000	1,447,739,000	-	685,692,000	21,747,253,000
Kab. Tolikara	333,338,000	1,029,969,000	15,203,013,000	16,566,320,000	1,536,514,000	580,000,000	765,692,000	19,448,526,000
Kab. Sarmi	139,197,000	673,289,000	5,066,011,000	5,878,497,000	913,447,000	580,000,000	765,692,000	8,137,636,000
Kab. Keerom	198,974,000	690,894,000	6,643,295,000	7,533,163,000	1,057,972,000	-	970,718,000	9,561,853,000
Kab. Waropen	176,359,000	765,894,000	5,614,057,000	6,556,310,000	799,672,000	-	-	7,355,982,000
Kab. Supiori	208,426,000	614,794,000	3,248,068,000	4,071,288,000	670,122,000	-	-	4,741,410,000
Kab. Memberamo Raya	162,504,000	713,079,000	3,465,543,000	4,341,126,000	737,772,000	-	-	5,078,898,000
Kab. Nduga	167,122,000	655,684,000	4,475,893,000	5,298,699,000	1,318,947,000	-	-	6,617,646,000
Kab. Lanny Jaya	264,062,000	690,894,000	6,017,142,000	6,972,098,000	1,691,739,000	-	-	8,663,837,000
Kab. Memberamo Tengah	240,969,000	689,794,000	3,578,127,000	4,508,890,000	793,122,000	580,000,000	-	5,882,012,000

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA	BOK				JAMPERSAL	AKREDITASI		JUMLAH
	DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK	BOK UKM KABUPATEN/KO TA	BOK PUSKESMAS	SUB TOTAL		AKREDITASI RS	AKREDITASI PUSKESMAS	
Kab. Yalimo	250,206,000	638,079,000	4,243,624,000	5,131,909,000	845,397,000	-	-	5,977,306,000
Kab. Puncak	254,825,000	655,684,000	4,588,508,000	5,499,017,000	1,479,164,000	-	-	6,978,181,000
Kab. Dogiyai	176,359,000	690,894,000	6,072,573,000	6,939,826,000	1,605,639,000	-	685,692,000	9,231,157,000
Kab. Intan Jaya	157,885,000	620,474,000	3,165,132,000	3,943,491,000	992,997,000	-	-	4,936,488,000
Kab. Deiyai	176,359,000	690,894,000	5,915,636,000	6,782,889,000	1,264,314,000	-	500,666,000	8,547,869,000
Kota Jayapura	208,211,000	597,189,000	5,438,720,000	6,244,120,000	1,218,264,000	-	970,718,000	8,433,102,000
TOTAL	80,014,000,000	404,235,869,000	4,342,404,403,000	4,826,654,272,000	1,266,053,848,000	48,500,000,000	475,991,880,000	6,617,200,000,000

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya. DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2017 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antar DAK Nonfisik, baik antara BOK, Jampersal serta Akreditasi Pukesmas dan Akreditasi Rumah Sakit.

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK